

TESIS

**ANALISIS FUNGSI PELAYANAN WATAMPONE DAN BALANGNIPA
TERHADAP PALATTAE**



**A. TENRI MULANA ILYAS
MPW 45 14 020**

**PROGRAM PASCA SARJANA
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS BOSOWA**

2017

TESIS

1. Judul : Analisis Fungsi Pelayanan Watampone Dan Balangnipa Terhadap Palattae
2. Nama Mahasiswa : A.Tenri Mulana Ilyas
3. NIM : MPW4514020
4. Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. Ir. Tommy S.S. Eisenring, M.Sc

Pembimbing II



Dr. Ir. Muh. Arif Nasution, M.Si.

Mengetahui:

Direktur PPs Universitas Bosowa,



Dr. Muhlis Ruslan, SE, M.Si.

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota



Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si.

DAFTAR ISI

SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Ruang Lingkup Penelitian..... 11

F. Sistematika Penulisan..... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori..... 13

1. Teori Tempat Sentral..... 13

2. Teori Interaksi Keruangan..... 19

3. Teori Carrother dan Teori Grafitasi 20

4. Teori Pertumbuhan dan Perkembangan Kota 22

5. Teori Pusat Kegiatan Banyak 31

6. Perkembangan Kawasan Pinggiran..... 36

B. Penelitian Sebelumnya	38
C. Rekonstruksi Teori dan Rumusan Variabel Penelitian	42
D. Kerangka Pikir Penelitian	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Jenis Dan Sumber Data	51
D. Populasi dan Sampel	52
E. Metode Pengumpulan Data.....	53
F. Variabel Penelitian.....	54
G. Metode Analisis Data.....	56
H. Proposisi Penelitian	57
I. Definisi Operasional.....	58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	60
1. Batas dan Wilayah Kabupaten Bone	60
2. Topografi dan Kelerengan Wilayah	64
3. Geohidrologi	65
4. Kondisi Geologi	66
5. Klimatologi	67
6. Pemanfaatan Lahan Kabupaten Bone.....	67
7. Aspek Kependudukan.....	71
8. Kondisi Sarana dan Prasarana	72

a. Permukiman	72
b. Fasilitas Pendidikan	73
c. Fasilitas Kesehatan	74
d. Fasilitas Perdagangan	75
e. Transportasi	75
9. Struktur dan Kontribusi Sektor Perekonomian	76
B. Kawasan Perkotaan Watampone	78
1. Kedudukan Watampone dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone	77
2. Administrasi dan Letak Geografis	79
3. Aspek Kependudukan Kawasan Perkotaan Watampone	81
4. Aspek Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Watampone	81
a. Perumahan dan Kawasan Permukiman	81
b. Fasilitas Perkantoran dan Pelayanan Umum	82
c. Fasilitas Pendidikan	82
d. Fasilitas Kesehatan	83
e. Fasilitas Ibadah	83
f. Fasilitas Olahraga	84
C. Kawasan Perkotaan Palattae	85
1. Kedudukan Kawasan Perkotaan Palattae dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone	85
2. Aspek Kependudukan Kawasan Perkotaan Palattae	87
3. Aspek Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Palattae	87

a. Fasilitas Pendidikan	87
b. Fasilitas Kesehatan	87
c. Fasilitas Perkantoran	88
4. Aspek Pertanian.....	88
D. Gambaran Umum Kawasan Perkotaan Balangnipa Kabupaten Sinjai.....	89
1. Geografis Wilayah	89
2. Aspek Kependudukan Kawasan Perkotaan Palattae	91
3. Aspek Sarana Wilayah.....	91
a. Fasilitas Pendidikan	91
b. Fasilitas Kesehatan	92
c. Fasilitas Perdagangan dan Industri Pengolahan.....	92
E. Karakteristik Responden.....	94
F. Analisis Pengaruh Fungsi Pelayanan Watampone Terhadap Palattae ; Dan Balangnipa Terhadap Palattae.....	95
1. Analisis Skala Gutman	95
a. Analisis Unsur Keterkaitan Fisik	98
b. Unsur Keterkaitan Ekonomi	99
c. Unsur Keterkaitan Fasilitas Sosial	100
2. Interpretasi Hasil Analisis Skala Guttman.....	101
3. Pembahasan Pengaruh Fungsi Pelayanan Watampone Terhadap Palattae	112
4. Pembahasan Pengaruh Fungsi Pelayanan Balangnipa Terhadap Palattae	115

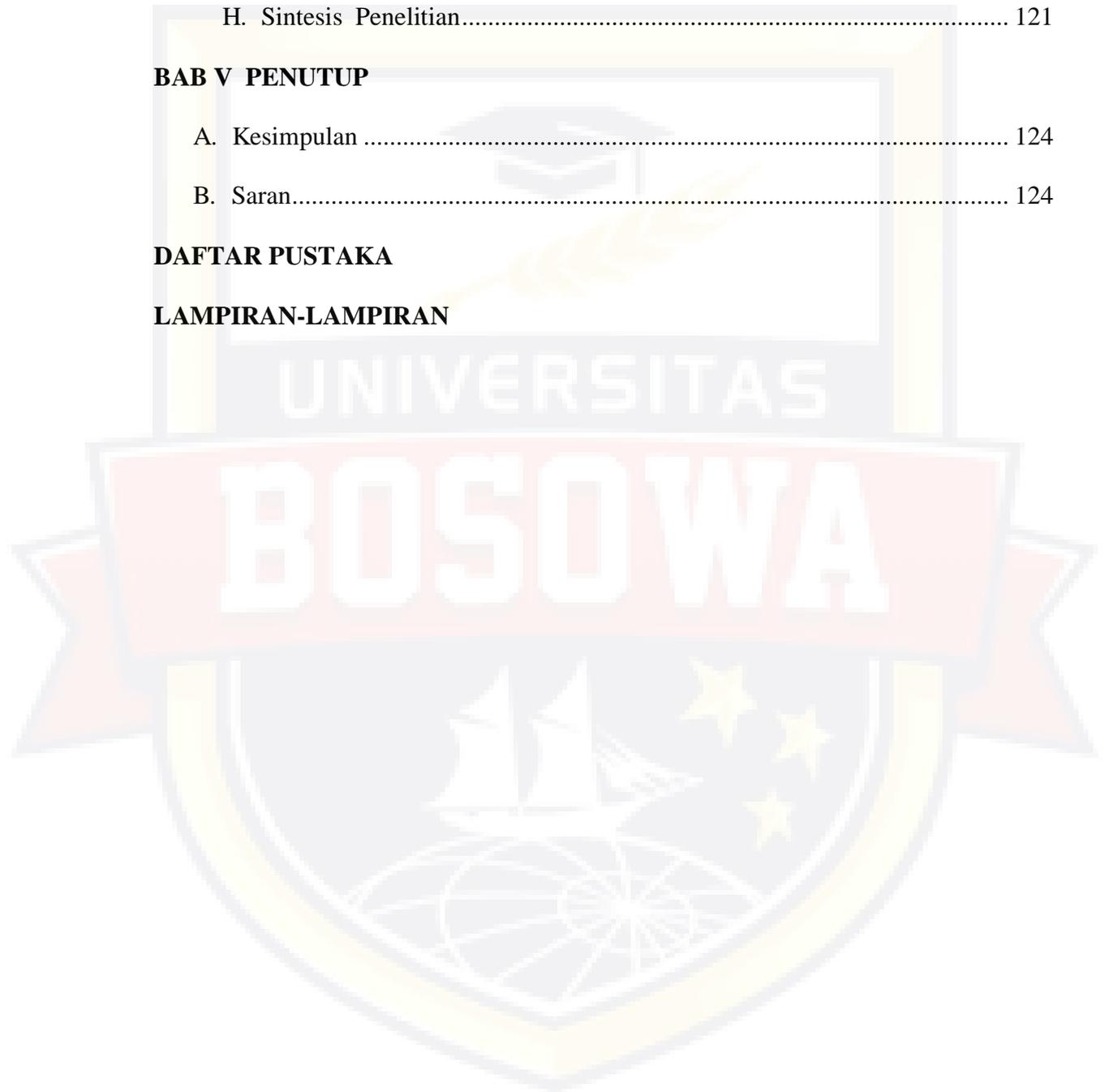
G. Analisis Pola Interaksi Wilayah Palattae dalam memanfaatkan fungsi Pelayanan Watampone dan Balangnipa	117
H. Sintesis Penelitian.....	121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Unsur Keterkaitan Wilayah dan Variabel Yang di Ukur.....	44
Tabel 3.1	Variabel dan Indikator Penelitian.....	54
Tabel. 4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kab. Bone Tahun.....	61
Tabel 4.2.	Luas Wilayah Menurut Ketinggian di Kab. Bone Tahun.....	64
Tabel 4.3.	Luas Wilayah Menurut Kemiringan di Kab. Bone Tahun	65
Tabel 4.4.	Sungai-sungai di Kab. Bone Tahun.....	65
Tabel 4.5.	Luas dan Jenis Penggunaan Lahan Kab. Bone.....	68
Tabel 4.6.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Perkecamatan Kab. Bone	71
Tabel 4.7.	Jumlah Fasilitas Pendidikan	74
Tabel 4.8.	Jumlah Fasilitas Kesehatan.....	74
Tabel 4.9.	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Berlaku.....	77
Tabel 4.10.	Lingkup Wilayah Kawasan Perkotaan Watampone	78
Tabel 4.11	Luas Kawasan Perkotaan Watampone Per Kecamatan	79
Tabel 4.12.	Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Watampone.....	81
Tabel 4.13.	Jumlah Fasilitas Pendidikan Perkotaan Watampone	83
Tabel 4.14.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Perkotaan Watampone	83
Tabel 4.15.	Jumlah Fasilitas Peribadatan Perkotaan Watampone	84
Tabel 4.16.	Jumlah Fasilitas Olah Raga Perkotaan Watampone	84
Tabel 4.17.	Tingkat Usia Responden.....	94
Tabel 4.18.	Tingkat Pendidikan Responden	95
Tabel 4.19.	Mata Pencaharian Responden.....	95
Tabel 4.20.	Hasil Rekapitan Tabulasi Data Kuisisioner.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	46
Gambar 3.2 Peta Orientasi Penelitian.....	50
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bone	63
Gambar 4.2 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bone	70
Gambar 4.3 Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Watampone.....	80
Gambar 4.4 Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Palattae	86
Gambar 4.5 Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Balangnipa.....	90
Gambar 4.6 Peta Pola Interaksi Wilayah Palattae – Watampone dan Palattae – Balangnipa	119
Gambar 4.7 Peta Pola Interaksi berdasarkan data kuesioner	120

BOSOWA



ABSTRAK

A.Tenri Mulana Ilyas (Analisis Fungsi Pelayanan Watampone, Dan Balangnipa Terhadap Palattae dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Tommy S.S. Eisenring, M.Sc selaku pembimbing I dan Dr. Ir. M. Arif Nasution, MP selaku pembimbing II). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fungsi pelayanan Watampone terhadap Palattae dan Balangnipa terhadap Palattae dan juga menganalisis pola interaksi wilayah Palattae dalam memanfaatkan fungsi pelayanan Watampone dan Balangnipa. fenomena fungsi pelayanan Watampone dan Balangnipa terhadap Palattae dengan menggunakan pendekatan geografi, fenomena interaksi keruangan antara wilayah inti dan hinterlandnya yang terjadi pada ketiga wilayah tersebut tidak terlepas dari tiga faktor utama yaitu faktor wilayah saling melengkapi, kesempatan untuk berintervensi, dan juga kemudahan aksesibilitas. Ke tiga faktor diatas berkaitan dengan pendekatan teori carother yang menyebutkan “Kekuatan hubungan ekonomis antara dua tempat, berbanding lurus dengan besarnya (banyaknya) penduduk dan berbanding terbalik dengan jarak antaranya”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan dianalisis menggunakan skala Guttman dan analisis gravitasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu, Palattae selaku PKLp menerima fungsi pelayanan dari Watampone sebagai PKW pada sektor fisik, social dan ekonomi, dilain sisi keberadaan Balangnipa sebagai PKL mampu mengintervensi interaksi keruangan Watampone dan Palattae karena faktor jarak sehingga fungsi pelayanan yang diterima Palattae dari Balangnipa lebih besar. Intervensi Balangnipa terhadap interaksi antara Watampone dan Palattae sekaligus menyiratkan bahwa tingkat ketergantungan Palattae sebagai PKLp terhadap Watampone sebagai PKW sangat kecil dan terbatas pada sektor tertentu saja sehingga sangat dimungkinkan untuk pengembangan wilayah dalam konteks pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kata Kunci: Fungsi Pelayanan Kota; Interaksi Keruangan; Kota Palattae, Kota Watampone, Kota Balangnipa.

ABSTRACT

A.Tenri Mulana Ilyas (Watampone Service Function Analysis, And Balangnipa Against Palattae is guided by Prof. Dr. Ir Tommy S.S. Eisenring, M. Sc as the supervisor of I and Dr. Ir. M. Arif Nasution, MP as the supervisor of II). This study aims to analyze the influence of Watampone service function on Palattae and Balangnipa against Palattae and also to analyze the interaction pattern of Palattae region in utilizing Watampone and Balangnipa service function. the phenomenon of service function of Watampone and Balangnipa to Palattae by using geography approach, spatial interaction phenomenon between core region and its hinterland that happened in those three areas can not be separated from three main factors that are complementary area, opportunity to intervene, and also accessibility ease. The above three factors are related to the carother theory approach which mentions "The strength of economic relations between two places, is directly proportional to the magnitude (number) of the population and inversely proportional to the distance between them." This study used a quantitative approach and analyzed using Guttman scale and gravity analysis. The result obtained from this research is that both areas are able to reach Palattae in terms of utilization of service function in the physical, social and economic sectors, but due to the distance factor so that the intensity and frequency are different, where the influence of Watampone service function as the Regional Activity Center tends to be less intensity compared to the Balangnipa service function to Palattae although only as a Center for Local Activities.

Keywords: City Service Function; Spatial Interactions; City of Palattae, Watampone City, Balangnipa City.

KATA PENGANTAR

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT oleh karena kasih dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“ANALISIS FUNGSI PELAYANAN WATAMPONE DAN BALANGNIPA TERHADAP PALATTAE)”**.

Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bosowa Makassar, dan merupakan salah satu proses akhir dari kegiatan pembelajaran di Universitas pada umumnya dan Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota pada khususnya.

Penulis menyadari bahwa betapa berat dan banyaknya halangan yang datang dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, Namun puji syukur dengan bantuan bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak, hambatan yang ada dapat dilalui dengan cepat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

- Yang tercinta dan saya sayangi kedua Orang Tua **Ayahanda A. Ilyas Palesangi** dan **Ibunda A. Hadijah Pawawoi** yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendoakan, memelihara dan memberikan bimbingan serta pengorbanan yang sangat besar dari awal perkuliahan hingga penyelesaian penyusunan tugas akhir ini.

- Bapak **Prof. Dr. Ir. Tommy S.S. Eisenring, M.Sc** selaku Pembimbing I dan **Dr.Ir.M. Arif Nasution, M.Si** selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan tesis.
- Bapak **Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si** dan **Dr. Ir. Murshal Manaf, MT** selaku Penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan tesis ini.
- Bapak **Ir. H. Khalil, MT** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bone dan **Ir. H. Anshar Namma, MP** selaku Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi Dinas PU Kab. Bone yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
- Yang tercinta **Jamaluddin, SE, MM** selaku suami yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta senantiasa mendampingi dalam segala usaha yang peneliti tempuh dalam penyelesaian tesis ini.
- Terima Kasih yang tak terhingga teruntuk seluruh dosen pengampu PPS PWK yang telah banyak mentransformasikan ilmu kepada kami selama ini dan Keluarga Besar Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar.
- Keluarga di Watampone yang telah memberikan saya motivasi/semangat dalam studi ini, Khususnya **Dra. A. Asni Pawawoi, MM** atas bantuannya dalam pengumpulan data-data sekunder tesis ini. terima kasih atas doa kalian.
- Seluruh Teman-teman Angkatan 2014 dan 2015 PPS PWK yang telah memberikan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung, Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimah kasih atas kebersamaan kita selama ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa hasil akhir dan penulisan Tesis ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran yang positif sebagai masukan dalam penyempurnaan penulisan tugas akhir ini, sehingga akan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalam.

Makassar,

2018

A. Tenri Mulana Ilyas



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi suatu daerah baik itu kabupaten maupun kota yang berlangsung di Indonesia berjalan terus menerus dan tiap daerah tersebut berusaha untuk memajukan daerahnya. Hal ini berkaitan dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembangkan wilayahnya. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka daerah diharapkan akan terus memiliki kemampuan untuk melakukan pembangunan ekonomi di daerahnya tanpa menunggu bantuan dari pusat. Pembangunan Ekonomi adalah satu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada, dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999 : 108).

Dalam konteks tersebut, maka pembangunan ekonomi diarahkan untuk memacu adanya pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya, yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi sebuah daerah secara lebih adil bagi seluruh masyarakat yang ada. Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi juga diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah dari perekonomian yang kecil dan sering berjalan ditempat (*stagnan*) menuju perekonomian daerah yang terus meningkat dan dinamis.

Nahrawi (2005 : 5), ciri-ciri dari daerah yang perekonomiannya meningkat secara terus menerus adalah; memiliki industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh serta memiliki basis-basis pertumbuhan sektoral yang berpotensi besar selain itu, pertumbuhan juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan dibidang lainnya yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan yang ada jika diarahkan pada daerah-daerah yang telah memiliki potensi atau fasilitas wilayah juga akan mempercepat terjadinya kemajuan ekonomi, karena secara tidak langsung kemajuan suatu daerah akan memacu masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih baik di daerah tersebut.

Dengan adanya peran Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas perekonomian, serta mengembangkan dan mempercepat perekonomian daerah yang ada, membuat pemerintah daerah harus dapat melihat dan menentukan wilayah-wilayah mana yang secara ekonomi, sosial, dan kultural memiliki potensi untuk dikembangkan, baik itu potensi yang ada secara alami maupun potensi yang telah tumbuh dikarenakan adanya pembangunan. Hal ini penting bagi pemerintah agar para pengambil kebijakan tersebut, dapat lebih menempatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lainnya pada lokasi tepat yang akan memberikan dampak-dampak yang positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan pembangunan ekonomi.

Terdapat dua perbedaan dalam suatu wilayah yang meliputi berbagai daerah, ada daerah yang penduduk/kegiatan yang terkonsentrasi pada suatu tempat dan ada juga yang kurang terkonsentrasi. (Tarigan, 2005 : 154). Tempat

yang terkonsentrasi tersebut dikenal dengan berbagai istilah, yaitu kota, pusat perdagangan, pusat industri, simpul industri, pusat perdagangan, daerah perkotaan atau daerah nodal. Masing-masing istilah itu bersangkutan paut dengan fungsi apa yang hendak ditonjolkan atas tempat-tempat konsentrasi tersebut. Sedangkan pada daerah di luar pusat konsentrasi juga dinamakan dengan berbagai istilah seperti daerah pedalaman, daerah pertanian, daerah pedesaan atau disebut sebagai wilayah belakang (*hinterland*). Dengan adanya perbedaan daerah yang ada pada suatu wilayah, hal ini menyebabkan adanya hubungan antara kedua daerah yang berbeda tersebut. Adanya penjelasan terhadap kedua daerah ini dapat bermanfaat dalam mengatur pembangunan dan menjamin suatu hubungan antar daerah-daerah tersebut, yang akan menciptakan keuntungan.

Secara umum Bone Bagian Selatan meliputi 12 kecamatan yang meskipun belum terdapat aturan/dokumen legal yang menegaskan hal tersebut namun secara geografis ke 12 kecamatan tersebut berada di wilayah bagian selatan Kabupaten Bone. Adapun ke 12 wilayah tersebut adalah Kec. Sibulue, Kec. Cina, Kec. Mare, Kec. Barebbo, Kec. Tonra, Kec. Kajuara, Kec. Salomekko, Kec. Patimpeng, Kec. Kahu, Kec. Libureng, Kec. Ponre dan Kec. Bontocani.

Berdasarkan kewenangan pengelolaan dan penetapan kawasan strategis dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, maka kawasan strategis di Kabupaten Bone terdiri atas kawasan strategis provinsi (KSP) dan kawasan strategis kabupaten (KSK).

Penentuan kawasan strategis salah satunya untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone. Penetapan kawasan ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone, dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada, sehingga diharapkan dapat menjadi sumber-sumber pendapatan ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat. Fungsi kawasan diarahkan untuk kegiatan budidaya, dengan mengembangkan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki kecenderungan pada, optimalisasi potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, potensi ekspor, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone Bagian Selatan meliputi :

1. Kawasan Perkotaan Watampone diarahkan pengembangannya sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial ekonomi, perdagangan dan jasa.
2. Kawasan Perkotaan Palattae di Kecamatan Kahu diarahkan sebagai sub pusat pengembangan wilayah, dengan fungsi sebagai pelayanan sosial, ekonomi perdagangan dan jasa, bagi kawasan bagian selatan.

Selain itu kawasan strategis lainnya yang berlokasi di bagian selatan Kabupaten Bone adalah kawasan strategis pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi yang berada di kawasan pabrik gula camming, Kec. Libureng dan pabrik gula arasoe di Kec. Cina.

Selain kawasan strategis, dalam sistem penataan ruang nasional, ditetapkan pula beberapa fungsi kota yang terintegrasi dalam RTRWN dan RTRWP Sulawesi Selatan, yang membentuk tata jenjang pelayanan kawasan perkotaan. Dalam konstelasi tersebut ditetapkan fungsi kawasan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Penjabaran dalam bentuk RTRW kabupaten ditetapkan beberapa fungsi kawasan perkotaan yang diharapkan dapat menunjang fungsi-fungsi tersebut, diantaranya Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Manurut analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone, diperoleh gambaran bahwa terdapat sekitar 27 kecamatan dan sekitar 25 Kawasan perkotaan yang teridentifikasi sebagai pusat pelayanan. Dari analisis tersebut menunjukkan, bahwa Kawasan Perkotaan Watampone, yang sekaligus sebagai ibukota Kabupaten Bone, mempunyai hirarki tertinggi dalam sistem pelayanan wilayah lalu kemudian Palattae dan diikuti oleh beberapa daerah lainnya.

Yang menarik bahwa arahan RTRW Kabupaten Bone mengenai arahan pengembangan kawasan strategis perkotaan watampone sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial ekonomi, perdagangan dan jasa skala kabupaten yang berarti bahwa 27 kecamatan dalam batas administrasinya yang merupakan hinterlandnya akan mendapatkan pengaruhnya, sejauh mana Watampone mampu melayani wilayah sekitarnya khususnya wilayah Palattae sebagai wilayah terjauh dan berpenduduk terbesar kedua setelah Watampone bila dikaitkan dengan

asumsi Walter Christaller mengenai Teori tempat sentral khususnya terkait jangkauan hierarkifungsi pelayanan pasar ($K = 3$) dan arus lalu lintas/transportasi ($K = 4$) yang menjelaskan bahwa jangkauan fungsi pelayanan sebuah tempat sentral terhadap sekitarnya hanya $1/3$ dan $1/2$ area sekitarnya.

Berbanding lurus dengan Watampone, Balangnipa sebagai ibukota Kabupaten Sinjai adalah Kota Pusat Pengembangan Wilayah (PPW) dengan fungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), secara administrasi kota tersebut termasuk wilayah Kabupaten Sinjai dan secara geografis merupakan salah satu kota terdekat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone Bagian Selatan. Posisi Balangnipa tersebut menjadi sangat menarik khususnya tentang pengaruhnya terhadap wilayah yang ada disekitarnya dalam hal jangkauan fungsi pelayanannya.

Selain kebijakan pemerintah terhadap Watampone, Balangnipa dan Palattae sebagaimana yang tertuang dalam RTRW wilayah masing-masing, juga terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fungsi pelayanan dari kawasan tersebut yaitu peningkatan jumlah penduduk dan ketersediaan fasilitas-fasilitas infrastruktur yang ada. Untuk jumlah penduduk khususnya di Palattae berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 37.399 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0.98 %. Hal ini berarti peningkatan jumlah kebutuhan akan fungsi pelayanan. Semakin banyaknya permintaan masyarakat akan barang/jasa dalam usaha pemenuhan kebutuhannya akan menyebabkan semakin tinggi tuntutan terhadap fungsi pelayanan yang diinginkan.

Besarnya tingkat kebutuhan masyarakat dan usaha dalam pemenuhan kebutuhannya menjadi hal yang menarik untuk diteliti khususnya terkait Palattae dengan status sebagai pusat kegiatan local promosi (PKLp) dengan posisi geografis terletak diantara 2 pusat pelayanan yaitu Watampone sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Balangnipa sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meskipun memiliki hierarki yang berbeda namun factor jarak menjadi hambatan bagi fungsi pelayanan Watampone untuk menjangkau Palattae yang notabene adalah hinterlandnya, lain halnya dengan Balangnipa, dengan fungsinya sebagai PKL, factor jarak menyebabkan Palattae menjadi salah satu hinterlandnya. Bagaimana pengaruh fungsi pelayanan Watampone terhadap Palattae dan Balangnipa terhadap Palattae serta demikian pula sebaliknya, kontribusi dalam sector apa Palattae bagi Watampone dan Balangnipa masih menjadi pertanyaan bagi peneliti.

Selain jumlah penduduk dan posisi geografis, ketersediaan fasilitas-fasilitas pelayanan dasar yang tersebar di kedua pusat kegiatan wilayah tersebut, juga menjadi dasar pertimbangan bagi masyarakat yang berada di kota Palattae untuk mendapatkan fungsi pelayanan yang diinginkan. asumsi bahwa tersebarnya fasilitas pelayanan umum, seperti fasilitas bidang social ekonomi, transportasi, dan administrasi menunjukkan bahwa terjadi penyebaran kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat perkotaan.

Salah satu hal yang juga melatarbelakangi penelitian ini disamping beberapa factor diatas adalah peneliti ingin mengetahui sejauhmana fungsi kawasan perkotaan Watampone yang secara spasial berkedudukan sebagai PKW

memberikan pengaruh pelayanan terhadap wilayah hinterlandnya termasuk Kota Palattae yang berkedudukan secara spasial sebagai PKLp dalam arahan struktur ruang wilayah Kabupaten Bone namun dipengaruhi oleh factor jarak, dan di satu sisi peneliti ingin melihat bagaimana intervensi Kota Balangnipa yang secara spasial berkedudukan sebagai PKL dalam struktur ruang Kabupaten Sinjai yang berbatasan langsung dengan Kota Palattae Kabupaten Bone, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran pada sector apa saja fungsi pelayanan Watampone masih berpengaruh terhadap Palattae agar dapat diketahui langkah dan kebijakan apa yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah di masa yang akan datang dan juga dapat menjawab isu terkait pengembangan wilayah khususnya pembentukan daerah otonomi baru (DOB) pada wilayah bagian selatan Kabupaten Bone dengan Palattae sebagai ibukota kabupaten.

Beranjak dari pembahasan latar belakang, dengan beberapa issue strategis yang merupakan potensi dan sekaligus tantangan bagi Palattae, maka perlu dilakukan penelitian tentang **Analisis Fungsi Pelayanan Watampone dan Balangnipa Terhadap Palattae**, dengan harapan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi salah satu acuan dalam perumusan rencana tata ruang yang komprehensif dan bersinergi antar satu wilayah dengan wilayah lainnya di Kabupaten Bone.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran pada latar belakang, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh fungsi pelayanan Watampone dan Balangnipa terhadap Palattae ditinjau dari fungsi masing-masing sebagai PKW dan PKL.
2. Bagaimana pola interaksi wilayah Palattae dalam memanfaatkan fungsi pelayanan Watampone dan Balangnipa.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam studi ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh fungsi pelayanan Watampone dan Balangnipa terhadap Palattae ditinjau dari fungsi masing-masing sebagai PKW dan PKL.
2. Untuk menganalisis pola interaksi wilayah Palattae dalam memanfaatkan fungsi pelayanan Watampone dan Balangnipa.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat di tinjau dari dua aspek diantaranya:

1. Aspek Keilmuan.

Penelitian terkait Analisis Fungsi Pelayanan Watampone Dan Balangnipa Terhadap Palattae dari segi keilmuan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kepastakaan ilmu planologi. Dengan pendekatan Teori Central place dimana suatu wilayah yang menyediakan barang dan jasa untuk wilayah disekelilingnya membentuk sebuah hierarki. Makin tinggi tingkat barang dan jasa, makin besar range-nya dari penduduk di tempat kecil. Dengan pendekatan teori ini peneliti ingin melihat fenomena pengaruh fungsi

pelayanan Watampone dan Balangnipa terhadap Palattae. Dan juga untuk mengetahui pola interaksi wilayah Palattae dalam memanfaatkan fungsi pelayanan Watampone dan Balangnipa dengan pendekatan analisa gravitasi.

2. Aspek Guna Laksana

Aspek guna laksana dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone serta perumusan kebijakan terkait pengembangan wilayah kedepannya;
- b. Menjadi bahan masukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya dalam kajian planologi terkait analisis fungsi pelayanan kawasan.

E. Ruang Lingkup Penelitian.

1. Ruang Lingkup Wilayah.

Yang menjadi ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Kota Watampone sebagai PKW dalam tinjauan RTRW Kabupaten Bone, Kota Balangnipa sebagai PKL dalam Tinjauan RTRW Kabupaten Sinjai dan Palattae sebagai PKLp dalam tinjauan RTRW Kabupaten Bone.

2. Ruang Lingkup Materi.

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah, kajian tentang fungsi pelayanan Watampone terhadap Palattae ; dan Balangnipa terhadap Palattae ditinjau dari sektor fisik, social dan ekonomi.

F. Sistematika Penulisan.

Untuk lebih memudahkan penulisan ini secara sistematis, maka diuraikan dalam bentuk sistematika penulisan yang secara garis besar menguraikan Bab dan Sub Bab dalam penulisan Tesis ini, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini menguraikan tentang landasan teori yang digunakan yaitu Teori Tempat Sentral, serta pembahasan mengenai beberapa penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, kerangka pikir dan hipotesis serta definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Kabupaten Bone, gambaran umum Watampone, Balangnipa dan Palattae, pengolahan data kuesioner, tinjauan fungsi pelayanan melalui ketersediaan fasilitas infrastruktur yang dimiliki, serta Hasil Analisis Variable Penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa daerah-daerah nodal itu mempunyai hirarki. Tidak semua daerah bersifat homogenitas tetapi terdapat perbedaan baik dalam persebaran penduduk maupun luas wilayahnya (Richardson, 2001:83). Oleh karena itu, sangat penting mengetahui tingkat hierarki suatu daerah sehingga dapat dilihat apa yang dibutuhkan oleh daerah dan kegiatan ekonomi apa yang cocok untuk daerah tersebut.

Menurut Christaller, setiap orde memiliki wilayah heksagonalnya sendiri-sendiri dan lebar barang Orde I sama dengan 3 kali lebar barang Orde II demikian seterusnya. Hal ini berarti barang Orde I memiliki luas jangkauan tiga kali barang Orde II. Jadi ada barang yang jangkauan pemasarannya cukup luas dan ada yang sedang dan kecil. Christaller juga mengatakan bahwa berbagai jenis barang pada orde yang sama cenderung bergabung pada pusat dari wilayahnya sehingga terjadi pusat konsentrasi. Oleh karena itu pada kenyataannya, terdapat hierarki diantara pusat-pusat konsentrasi tersebut. Berdasarkan $k=3$, pusat dari hierarki yang lebih rendah berada pada pengaruh pusat hierarki yang lebih tinggi (Robinson, 2010:82).

Dalam penentuan lokasi permukiman, dibutuhkan analisis dengan metode yang tepat agar lokasi tersebut optimal. Penentuan lokasi permukiman ini perlu memperhatikan aspek-aspek yang terdapat di dalamnya. Aspek tersebut

dapat disebut juga sebagai satuan permukiman. Adapun syarat dari satuan permukiman antara lain adanya lokasi (lahan) dengan lingkungan dan sumber daya yang mendukung, adanya kelompok manusia (masyarakat), sumber daya buatan, dan terdapat fungsi kegiatan ekonomi sosial dan budaya.

Teori Christaller (1933) menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah. Bunyi teori Christaller adalah Jika persebaran penduduk dan daya belinya sama baiknya dengan bentang alam, sumber dayanya, dan fasilitas transportasi, semuanya sama/seragam, lalu pusat-pusat permukiman menyediakan layanan yang sama, menunjukkan fungsi yang serupa, dan melayani area yang sama besar, maka hal tersebut akan membentuk kesamaan jarak antara satu pusat permukiman dengan pusat permukiman lainnya.

Konsep Teori Christaller :

- Range (jangkauan)
- Jarak yang perlu ditempuh untuk mendapatkan kebutuhannya.
- Threshold (ambang penduduk) Jumlah minimal penduduk untuk dapat mendukung suatu penawaran jasa.

Central place yang menyediakan barang dan jasa untuk wilayah disekelilingnya membentuk sebuah hierarki. Makin tinggi tingkat barang dan jasa, makin besar range-nya dari penduduk di tempat kecil. Christaller berasumsi pada homogenitas karakter fisik dan homogenitas karakteristik penduduk. Christaller menggunakan bentuk *hexagon* untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang saling bersambungan. Lingkaran yang mencerminkan wilayah

yang saling bertindih lalu dibelah dua dengan garis lurus. Sehingga dapat dipilih lokasi yang paling efisien. Sehingga dengan membayangkan hexagonal-hexagonal tersebut terciptalah *hierarki pemukiman* dan *wilayah pasaran*.

Berikut ini asumsi – asumsi Christaller dalam penyusunan teorinya :

- Konsumen menanggung ongkos angkutan, maka jarak ke tempat pusat dinyatakan dalam biaya dan waktu;
- Jangkauan (range) suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu;
- Konsumen memilih tempat pusat yang paling dekat untuk mendapatkan barang dan jasa;
- Kota-kota berfungsi sebagai tempat pusat bagi wilayah disekitarnya;
- Wilayah tersebut adalah suatu dataran yang rata, mempunyai ciri-ciri ekonomis sama dan penduduknya juga tersebar secara merata.

Teori tempat pusat memiliki elemen dasar yang terdiri dari : fungsi sentral, yakni adanya suatu tempat pusat yang dibentuk oleh fungsi yang bersifat memusat karena fungsi (barang/jasa) hanya ada pada beberapa titik tertentu saja. *Threshold* (batas ambang) adalah jumlah penduduk tertentu yang mendukung keberadaan fungsi tertentu. Fungsi dalam hal ini yaitu kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Jumlah yang dimaksud dapat meliputi beberapa puluh keluarga bagi satu atau beberapa ratus keluarga bagi suatu pasar harian. Kalau jumlah itu di bawah jumlah tertentu/ambang, maka pelayanan menjadi mahal dan kurang efisien; sebaliknya bila meningkat di atas jumlah ambang pelayanan akan menjadi kurang baik dan kurang efektif. Bila kegiatan itu

menyangkut jual beli maka jumlah penduduk di bawah ambang akan mengakibatkan rugi dan terancam tutup; sebaliknya bila di atas ambang maka akan memperoleh untung dan mengundang entry serta dalam jangka waktu tertentu mempertajam persaingan.

Kemudian range yakni jarak di mana penduduk masih mau untuk melakukan perjalanan untuk mendapatkan pelayanan atau fungsi tertentu. Lebih jauh dari jarak ini orang akan mencari tempat lain yang lebih dekat untuk memenuhi kebutuhannya akan jasa yang sama. Dari elemen dasar tersebut muncullah sebuah pola, yaitu pola heksagonal. Pola heksagonal yaitu pusat-pusat membentuk segitiga pelayanan yang jika digabungkan akan membentuk pola heksagonal yang merupakan wilayah pelayanan yang dianggap optimum.

Menurut Christaller, pusat-pusat pelayanan cenderung tersebar di dalam wilayah menurut pola berbentuk heksagon (segi enam). Keadaan seperti itu akan terlihat dengan jelas di wilayah yang mempunyai dua syarat, yaitu:

- topografi yang seragam sehingga tidak ada bagian wilayah yang mendapat pengaruh dari lereng dan pengaruh alam lain dalam hubungan dengan jalur pengangkutan;
- kehidupan ekonomi yang homogen dan tidak memungkinkan adanya produksi primer, yang menghasilkan padi-padian, kayu atau batu bara.
- Teori Christaller (1933) menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah. Model Christaller ini merupakan suatu sistem geometri yang menjelaskan model area perdagangan

heksagonal dengan menggunakan jangkauan atau luas pasar dari setiap komoditi yang dinamakan *range* dan *threshold*.

- (a) Prinsip pasar (*marketing principle*) $k=3$: pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya, seperti pasar, sering disebut kasus pasar optimal. Dinamakan $K=3$ (K3), karena suatu kegiatan di tempat pusat akan melayani 3 tempat pusat untuk fungsi di bawahnya yaitu 1 tempat pusat sendiri di tambah 2 tempat pusat hirarki di bawahnya.
- (b) Prinsip lalu lintas (*traffic principle*) $k=4$: bagaimana meminumkan jarak penduduk untuk mendapatkan pelayanan fungsi di tempat pusat. Bersifat linier, karena tempat pusat berada pada titik tengah dari setiap sisi heksagon. Sehingga daerah tersebut dan daerah sekitarnya yang terpengaruh senantiasa memberikan kemungkinan jalur lalu lintas paling efisien, sering disebut situasi lalu lintas yang optimum. Teori ini disebut sebagai $k=4$ karena 1 empat pusat melayani empat tempat pusat lain; 1 pada tempat pusatnya itu sendiri dan 3 dari tempat pusat lain.
- (c) Prinsip administrasi (*administrative principle*) $k=7$: wilayah ini mempengaruhi wilayahnya sendiri dan seluruh bagian wilayah – wilayah tetangganya, prinsip utamanya adanya kemudahan dalam rentang kendali pengawasan pemerintahan, sehingga sering disebut situasi administrative optimum dimana keenam pusat hirarki di bawahnya berada pada batas wilayah pelayanan hirarki di atasnya.

Teori Tempat Pusat oleh Christaller (1933) menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah.

Model Christaller menggambarkan area pusat-pusat kegiatan jasa pelayanan cenderung tersebar di dalam wilayah membentuk pola segi enam, yang secara teori bisa memberikan keuntungan optimal pada kegiatan tersebut. Tempat – tempat pusat tersebut yakni sebagai suatu tempat yang menyediakan barang dan jasa-jasa bagi penduduk daerah belakangnya.

Elemen–elemen tempat pusat yakni range (jangkauan), threshold, dan fungsi sentral Ketiga elemen itu yang mempengaruhi terbentuknya tempat pusat dan luasan pasar baik pelayanan barang maupun jasa pada suatu wilayah. Teori tempat pusat merupakan teori mengenai hubungan fungsional antara satu tempat pusat dan wilayah sekelilingnya. Juga merupakan dukungan penduduk mengenai fungsi tertentu. Christaller tidak mendasar pada jangkauan wilayah pasar, dan memiliki hirarki – hirarki dalam pola heksagonalnya. Luas wilayah pasar juga tidak tergantung pada barang yang diproduksi.

Teori tempat sentral sangat relevan untuk digunakan didalam perencanaan wilayah, hal ini dikarenakan teori tempat sentral menjelaskan tiga konsep dasar yang sangat penting peranannya dalam membangun wilayah yakni ambang (threshold), lingkup (range) dan hierarki (hierarchy). Ketiga konsep tersebut, dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan ketergantungan antara pusat-pusat konsentrasi dan wilayah-wilayah disekitarnya (Adissasmita,2005: 57).

2. Teori Interaksi keruangan (Edward Ulman 1951)

Pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun untuk memenuhi kebutuhan sosial lainnya, dapat di evaluasi secara geografi. Tingkah-laku manusia dalam bentuk gerak perpindahan tadi, erat hubungannya dengan faktor-faktor geografi pada ruang yang bersangkutan, dalam (Nursid Sumaatmadja 1988 : 147. S. Agnas; 2013. E.S Rizal ; 2012. M.Zahra ; 2013. A. Iin ; 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut Edward Ullman mensistematisakan faktor yang mendasari interaksi keruangan yaitu :

- a. *Region* yang saling melengkapi (*region Complementary*), yaitu adanya region yang berbeda sumber dayanya, di satu pihak surplus dan di lain pihak surplus dan di lain pihak minus. Kondisi ini memberikan kemungkinan terjadinya pengaliran yang besar dan membangkitkan interaksi keruangan yang tinggi intensitasnya;
- b. Kesempatan berintervensi (*Intervening Opportunity*), yaitu adanya kemungkinan perantara yang dapat menghambat terjadinya interaksi. Adanya daerah yang dapat berintervensi terhadap dua daerah yang memungkinkan untuk berinteraksi, yang dapat menghambat proses interaksi keruangan kedua daerah yang disebutkan terakhir. Adanya alternatif sumber daya yang menghalangi atau menghambat arus komoditi diantara dua daerah yang dapat berinteraksi (perdagangan), merupakan kesempatan intervensi yang menghambat interaksi tadi. Jadi, kesempatan intervensi ini dapat menghambat terjadinya interaksi keruangan;
- c. Kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang (*Spatial Transferability*),

yaitu fungsi jarak yang diukur dalam biaya dan waktu yang nyata, juga termasuk karakteristik yang khusus dari barang yang di transfer. Komoditi tertentu yang dibutuhkan sesuatu daerah dari daerah lain yang tertentu pula, memiliki daya transfer yang tinggi. Jarak yang di tempuh, biaya angkut yang memadai, dan transportasi yang lancar, merupakan kemudahan transfer dalam ruang yang menjamin lancarnya interaksi.

3. Teori Carrother dan Teori Grafitasi W.J. Reilly (1929).

Dalam melihat fenomena interaksi keruangan, salah satu teori yang digunakan untuk menjawab fenomena ini adalah teori Carrother (Surya B; 2013. A. Eni dan H. Tri ; 2014) dimana teori ini menjelaskan bahwa “Kekuatan hubungan ekonomis antara dua tempat, berbanding lurus dengan besarnya (banyaknya) penduduk dan berbanding terbalik dengan jarak antaranya”.Teori ini memiliki kemiripan dengan hukum gravitasi Newton (1687). Permodelan yang dapat digunakan dalam melakukan analisis terhadap pola interaksi atau keterkaitan antar daerah atau antar bagian wilayah dengan wilayah lainnya, adalah Model Gravitasi. Dalam hukum gravitasi dikatakan “gaya tarik menarik itu berbanding lurus dengan massa-massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya.”Konsep gravitasi ini secara khusus di perkenalkan oleh W.J. Reilly (1929). Model gravitasi dalam bidang geografi dapat di estimasikan sebagai ukuran arus diantara dua region dengan mengalikan kedua massa dari dua region yang bersangkutan, yang kemudian dibagi oleh kelipatan jarak diantara kedua *region* itu.

Pada bidang geografi, massa tersebut diatas adalah ungkapan jumlah penduduk *region* yang bersangkutan. Selain itu penerapan model ini dalam bidang analisis perencanaan kota adalah dengan anggapan dasar bahwa factor aglomerasi penduduk, pemusatan kegiatan atau potensi sumber daya alam yang dimiliki, mempunyai daya tarik yang dapat dianalogikan sebagai daya tarik menarik antara 2 (dua) kutub magnet. Kekuatan yang ada pada kedua region merupakan kekuatan yang terjadi akibat keterkaitan-keterkaitan antara wilayah yang di sebabkan oleh homogenitas kondisi wilayah. kriteria homogenitas dapat dinyatakan sebagai karakteristik-karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi.

4. Pertumbuhan dan Perkembangan Kota

Kota memiliki pengertian yang berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang dan bidang kajian yang dilakukan. Secara umum beberapa unsur yang terdapat pada pengertian kota adalah: kawasan pemukiman dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang relatif tinggi, memiliki luas areal terbatas, pada umumnya bersifat non agraris, tempat sekelompok orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis individualistis (dalam Kamus Tata Ruang, 1997:52).

a. Pertumbuhan Kota

1) Pengertian Pertumbuhan Wilayah

Menurut Alkadri, dkk (1999: 11) pertumbuhan wilayah merupakan suatu proses dinamika perkembangan internal dan eksternal wilayah tersebut, pertumbuhan wilayah pada awalnya dipicu oleh adanya pasar yang dapat menyerap hasil produksi wilayah yang bersangkutan.

2) Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Kota

Cara faktor-faktor internal memengaruhi pertumbuhan wilayah dapat diuraikan sebagai berikut (lihat Perroux, 1955, dalam Glasson, 1990:88) :

- a) Tahap pertama, tahap perekonomian subsistem swasembada. Pada tahap ini masih sedikit investasi di wilayah tersebut dan didominasi oleh sektor pertanian.
- b) Tahap kedua, terjadi setelah adanya kemajuan transportasi dan perdagangan yang mendorong spesialisasi wilayah yang memunculkan industri sederhana di desa-desa untuk memenuhi kebutuhan para petani. Lokasi industri desa ini dekat dengan lokasi pertanian setempat.
- c) Tahap ketiga, dengan semakin bertambahnya perdagangan antar wilayah, wilayah yang bersangkutan akan maju melalui suatu urutan perubahan tanaman pertanian.
- d) Tahap keempat, penduduk semakin bertambah dan berkurangnya tambahan hasil pertanian akan memaksa wilayah yang bersangkutan melakukan industrialisasi (tanpa industrialisasi akan mengakibatkan tekanan penduduk, menurunnya taraf hidup, stagnasi, dan kemerosotan kehidupan masyarakat). Industri sekunder mulai berkembang, mengolah produk primer dan akan mengarah ke spesialisasi.

e) Tahap kelima, merupakan pengembangan industri tersier yang berorientasi ekspor. Wilayah ini akan menyalurkan/mengekspor model, keterampilan, dan jasa-jasa yang bersifat khusus ke wilayah yang kurang berkembang.

Pengaruh eksternal dalam pertumbuhan wilayah didekati melalui teori Basis Ekspor (Export Base Theory). Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan suatu wilayah dipengaruhi oleh eksplotasi sumber daya alam dan pertumbuhan basis ekspor wilayah yang bersangkutan serta dipengaruhi oleh tingkat permintaan eksternal dari wilayah lainnya.

Pendapatan yang diperoleh dari ekspor akan mengakibatkan berkembangnya kegiatan-kegiatan penduduk setempat, perpindahan modal dan tenaga kerja. Pengaruh-pengaruh eksternal dapat memengaruhi pertumbuhan wilayah secara optimal jika faktor/variabel utama yaitu pola pendapatan dan pengeluaran sektor ekspor, inisiatif bisnis lokal, dan peranan pemerintah diusahakan secara maksimal (dalam Richardson, 2001:44). Teori lain yang menjelaskan pengaruh eksternal adalah model alokasi sumber daya antar wilayah, model ini mengasumsikan bahwa faktor-faktor produksi terutama tenaga kerja dan modal akan mengalir dari wilayah dengan tingkat upah rendah ke wilayah-wilayah dengan tingkat upah tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, maka tumbuhnya area di sekitar kampus perguruan tinggi memiliki faktor internal yaitu pada awalnya lahan area didominasi oleh lahan pertanian; kemudian mendorong spesialisasi wilayah yang memunculkan kawasan perguruan tinggi; dengan adanya kampus tersebut maka muncul kampus-kampus lainnya disusul oleh munculnya

perdagangan dan jasa; dan bertambahnya penduduk yang mengakibatkan munculnya permukiman-permukiman baru yang pada awalnya hasil pekerjaan penduduk setempat dari hasil pertanian berubah ke arah pelayanan ekonomi untuk melayani aktivitas perguruan tinggi; Perguruan Tinggi atau konsentrasi perguruan-perguruan tinggi lain tersebut kemudian menyalurkan keterampilan jasa-jasa yang bersifat khusus ke arah wilayah yang kurang berkembang sehingga di sekitar area kampus mulai bertumbuh. Untuk faktor eksternalnya yaitu dengan adanya kampus memberikan pelayanan sumber daya tenaga kerja antar kampus-kampus kecil lainnya sehingga muncul permukiman - permukiman tenaga kerja dan kegiatan-kegiatan komersil di area sekitar kampus tersebut.

b. Perkembangan Kota

1) Pengertian Perkembangan Kota

Perkembangan kota menurut Raharjo (1982), bermakna perubahan yang dialami oleh daerah perkotaan pada aspek-aspek kehidupan dan penghidupan kota tersebut, dari tidak ada menjadi ada, dari sedikit menjadi banyak, dari kecil menjadi besar, dari ketersediaan lahan yang luas menjadi terbatas, dari penggunaan ruang yang sedikit menjadi teraglomerasi secara luas, dan seterusnya (dalam Widyaningsih, 2001).

Keberadaan perguruan tinggi pada daerah-daerah pinggiran sebagai bentuk perkembangan suatu kota yakni penyebaran fasilitas-fasilitas perkotaan yang merata sebagai tempat aktivitas masyarakatnya, yang

sebelumnya pengembangan kawasan perkotaan cenderung masih terkonsentrasi di pusat.

Kota memiliki pengertian yang berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang dan bidang kajian yang dilakukan. Secara umum beberapa unsur yang terdapat pada pengertian kota adalah: kawasan pemukiman dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang relatif tinggi, memiliki luas areal terbatas, pada umumnya bersifat non agraris, tempat sekelompok orang-orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis dan individualistis (Yunus, 1999). Bentuk kota yang terjadi sekarang tidak terlepas dari proses pembentukan kota itu sendiri. Perkembangan kota, pada hakekatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan. Perkembangan adalah suatu proses perubahan keadaan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda. Perkembangan dan pertumbuhan kota berjalan sangat dinamis. Menurut Branch (1995) beberapa unsur yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota antara lain :

- a. Keadaan geografis, yakni pengaruh letak geografis terhadap perkembangan fisik dan fungsi yang diemban oleh kota. Kota pantai misalnya akan berkembang secara fisik pada bagian daratan yang berbatasan dengan laut dengan perkembangan awal di sekitar pelabuhan. Oleh karenanya kota demikian memiliki fungsi sebagai kota perdagangan dan jasa serta sebagai simpul distribusi jalur transportasi pergerakan manusia dan barang.

- b. Tapak (site), merujuk pada topografi kota. Sebuah kota akan berkembang, dengan memperhitungkan kondisi kontur bumi. Dengan demikian pembangunan sarana dan prasarana kota akan menyesuaikan dengan topografinya agar bermanfaat secara optimal.
- c. Fungsi yang diemban kota, yaitu aktivitas utama atau yang paling menonjol yang dijalankan oleh kota tersebut. Kota yang memiliki banyak fungsi, seperti fungsi ekonomi dan kebudayaan, akan lebih cepat perkembangannya daripada kota berfungsi tunggal.
- d. Sejarah dan kebudayaan yang melatarbelakangi terbentuknya kota juga berpengaruh terhadap perkembangan kota, karena sejarah dan kebudayaan mempengaruhi karakter fisik dan masyarakat kota.
- e. Unsur-unsur umum, yakni unsur-unsur yang turut mempengaruhi perkembangan kota seperti bentuk pemerintahan dan organisasi administratif, jaringan transportasi, energi, pelayanan sosial dan pelayanan lainnya.

Kesemua unsur tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi dan dalam tampilan fisik tercermin dari bentukan fisik perkotaan yang mengemban fungsi-fungsi tertentu. Pertumbuhan kota lebih cenderung dianalisis dari pertumbuhan penduduk perkotaan. Dimensi perkembangan dan pertumbuhan kota dapat ditinjau dari pengaruh pertumbuhan penduduk yang tidak terlepas dari suatu proses yang disebut urbanisasi. Menurut Herlianto (1986), urbanisasi ditinjau dari konsep keruangan (spasial) dan ekologis sebagai suatu gejala geografis. Konsep pemikirannya didasarkan pada adanya

gerakan/perpindahan penduduk dalam suatu wilayah atau perpindahan penduduk keluar dari suatu wilayah tertentu. Gerakan atau perpindahan penduduk yang terjadi tersebut disebabkan adanya salah satu komponen dari ekosistemnya yang kurang atau tidak berfungsi dengan baik, sehingga terjadi ketimpangan dalam ekosistem setempat, serta terjadinya adaptasi ekologis baru bagi penduduk yang pindah dari daerah asalnya ke daerah baru (perkotaan). Menurut Catanese (1998) faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kota ini dapat berupa faktor fisik maupun non fisik. Faktor-faktor fisik akan mempengaruhi perkembangan suatu kota diantaranya :

- a. Faktor lokasi, faktor lokasi dimana kota itu berada akan sangat mempengaruhi perkembangan kota tersebut, hal ini berkaitan dengan kemampuan kota tersebut untuk melakukan aktivitas dan interaksi yang dilakukan penduduknya.
- b. Faktor geografis, kondisi geografis suatu kota akan mempengaruhi perkembangan kota. Kota yang mempunyai kondisi geografis yang relatif datar akan sangat cepat untuk berkembang dibandingkan dengan kota di daerah bergunung-gunung yang akan menyulitkan dalam melakukan pergerakan baik itu orang maupun barang.

Sedang faktor-faktor non fisik yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu kota dapat berupa :

- a. Faktor perkembangan penduduk, perkembangan penduduk dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu secara alami (internal) dan migrasi (eksternal). Perkembangan secara alami berkaitan dengan kelahirandan

kematian yang terjadi di kota tersebut, sedangkan migrasi berhubungan dengan pergerakan penduduk dari luar kota masuk kedalam kota sebagai urbanisasi, dimana urbanisasi dapat mempunyai dampak positif maupun negatif. Perkembangan dikatakan positif apabila jumlah penduduk yang ada tersebut merupakan modal bagi pembangunan, dan berdampak negatif apabila jumlah penduduk membebani kota itu sendiri.

- b. Faktor aktivitas kota, kegiatan yang ada di dalam kota tersebut, terutama kegiatan perekonomian. Perkembangan kegiatan perekonomian ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam kota itu sendiri (faktor internal) yang meliputi faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal serta faktor-faktor yang berasal dari luar daerah (faktor eksternal) yaitu tingkat permintaan dari daerah-daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan.

2) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kota

Menurut Anthony Catenese (1989) faktor-faktor yang dapat memengaruhi perkembangan kota ini dapat berupa faktor fisik dan non fisik. Faktor-faktor fisik akan memengaruhi perkembangan suatu kota di antaranya :

a) Faktor Lokasi

Faktor lokasi dimana kota itu berada akan sangat mempengaruhi perkembangan kota tersebut, hal ini berkaitan dengan kemampuan kota

tersebut dalam melakukan aktifitas dan interaksi yang dilakukan penduduknya. Kota yang berlokasi di jalur jalan utama atau persimpangan jalan utama akan mampu menyebarkan pergerakan dari dan semua penjuru serta menjadi titik pertemuan antara pergerakan dari berbagai arah.

b) Faktor Geografis

Kondisi geografis suatu kota akan memengaruhi perkembangan kota. Kota yang mempunyai kondisi geografis relatif datar akan sangat cepat untuk berkembang dibandingkan dengan kota di daerah yang sangat berkontur yang akan menyulitkan dalam melakukan pergerakan, baik orang maupun barang. Selain itu kota di daerah yang sangat berkontur akan sulit untuk direncanakan dan didesain dibanding daerah yang relatif datar. Sebagai gambaran, kota yang berada di dataran rendah (rata) lebih cepat berkembang dibanding kota yang berada di daerah yang sangat berkontur.

Faktor fisik mengenai keberadaan lokasi pendidikan tinggi merupakan magnet bagi para pengusaha untuk mendirikan usaha jasa di sekitarnya. Terbangunnya jalur jalan utama yang langsung ke area kampus menyebabkan tumbuhnya permukiman-permukiman dan kegiatan komersil baru di sepanjang jalan utama. Kondisi geografi yang relatif datar menambah laju perkembangan area kampus tersebut.

Sedang faktor-faktor non fisik yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu kota dapat berupa :

c) Faktor Perkembangan Penduduk

Perkembangan penduduk dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu secara alami (internal) dan migrasi (eksternal), perkembangan secara alami adalah yang berkaitan dengan kelahiran dan kematian yang "terjadi di kota tersebut, sedangkan migrasi berhubungan dengan pergerakan penduduk dari luar kota masuk kedalam kota. Menurut Daldjoeni (1987) pembahasan tentang laju perkembangan penduduk meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan dan penyebaran. Penyebaran kepadatan penduduk dipengaruhi oleh empat unsur geografis yaitu lokasi, iklim tanah dan air (Kartasapoetra, 1985:46).

d) Faktor Aktivitas Kota

Kegiatan yang ada di dalam kota tersebut, terutama adalah kegiatan perekonomian. Perkembangan kegiatan perekonomian ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam kota itu sendiri (faktor internal) yang meliputi faktor-faktor produksi

Untuk faktor non fisik yaitu faktor aktivitas utama yang sebagian besar merupakan kegiatan perekonomian baru yang tidak terlepas dari terciptanya pasar yang sangat potensial dari keberadaan Kampus pendidikan tinggi. Banyaknya mahasiswa yang kuliah di Kampus pendidikan tinggi tersebut merupakan pasar yang sangat potensial untuk dijadikan lahan bisnis. Hal inilah yang menyebabkan fenomena menjamurnya usaha jasa yang didirikan di sekitar Kampus pendidikan tinggi. Hal ini bukan hanya untuk kebutuhan aktivitas di kampus

pendidikan tinggi tersebut tetapi juga bagi penduduk yang menghuni di sekitarnya.

5. Teori Pusat Kegiatan Banyak

Pentingnya pemasukan ide “multiple nuclei” pada suatu teori yang bersifat “*unicentered*” pertama kali diusulkan oleh C.D Haris F.L Ullamann (1945) dalam artikelnya yang berjudul “*The Nature of Citiens*” dan dibuat dalam, “*The Annals of The American Academy of Political and Socoal Science*, vol 242, 1945. Tesisnya tersebut kemudian terkenal dengan nama “*multiple nuclei theory*” (Teori pusat kegiatan banyak) teori yang diciptakannya tidak lagi menunjukkan tingkatan generalisasi yang cukup besar sebagaimana teori-teori sebelumnya, namun lebih mendekati kenyataan-kenyataan.

Menurut pendapatnya, bahwa kebanyakan kota-kota besar tidak tumbuh dalam ekspresi ke ruangan yang sederhana, yang hanya ditandai oleh satu pusat kegiatan saja (*unicentered theory*) namun terbentuk sebagai suatu produk perkembangan dan integrasi yang berlanjut terus-menerus dari sejumlah pusat-pusat kegiatan yang terpisah satu sama lain dalam suatu sistem perkotaan (*multi centered theory*). Pusat-pusat ini dan distrik-distrik disekitarnya didalam proses pertumbuhan selanjutnya kemudian ditandai oleh gejala spesialisasi dan diferensiasi ruang. Lokasi zona-zona keruangan yang terbentuk tidak ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor jarak dari CBD serta membentuk zona-zona ruang yang teratur, namun berasosiasi dengan

sejumlah faktor dan pengaruh faktor-faktor ini akan menghasilkan pola-pola keruang yang khas.

Faktor-faktor penyebab aglomerasi/ disaglomerasi fungsi, Beberapa faktor penyebab dapat dikemukakan, yaitu :

1) Fasilitas-fasilitas yang khusus tertentu (specialized facilities)

Menurut pendapatnya, kegiatan-kegiatan tertentu membutuhkan fasilitas-fasilitas tertentu, sebagai contoh “*daerah-daerah pengencer/ retail districts*” dalam kegiatannya sangat membutuhkan aksesibilitas yang maksimal. Hal ini mempunyai pengertian berbeda dengan ide sentralitas geometri. Misalnya distrik pelabuhan akan menguntungkan bilah terletak pada pinggir perairan yang dapat dilayari; daerah pabrik-pabrik hendaknya dekat dengan sarana angkutan yang besar dan lain-lain.

2) Faktor ekonomi eksternal (external economies)

Seperti terjadi dikota-kota besar, adanya pengolompokan fungsi-fungsi yang sejenis menimbulkan keuntungan tersendiri. Pengolompokan akan berarti peningkatan konsentrasi pelanggan-pelanggan potensial dan memudahkan dalam membandikan satu sama lain.

3) Faktor saling merugikan antara fungsi yang tidak serupa

Antagonisme antara pengembangan pabrik-pabrik dan pengembangan permukiman klas tinggi merupakan contoh yang sangat nyata. Konsentrasi pejalan kaki yang tinggi, mobil-mobil didaerah pengecer (retail district) sangat antagonistik terhadap pemusatan fasilitas transportasi kereta api dan

juga terhadap daerah untuk membongkar muat barang-barang pada “*wholesale district*” atau daerah-daerah industri besar dan sebaliknya.

4) Faktor kemampuan ekonomi fungsi yang berbeda

Sering sekali terjadi bahwa fungsi tertentu justru tidak menempati lokasi yang sebenarnya ideal karena ketidakmampuan ekonomi. Sebagai contoh perumahan kelas rendah tidak mampu menempati lahan yang nyaman dengan pemandangan yang indah karena tingginya sewa lahan pada lokasi seperti ini. Adanya persaingan bebas, akan menempatkan “*permukiman kelas tinggi*” pada lokasi lahan tersebut, karena mampu membayar “*sewa*” yang tinggi dan permukiman kelas rendah akan terlempar pada lokasi-lokasi yang sangat jelek dan identik dengan sewa yang murah / sesuai dengan kemampuan ekonominya. Banyak sedikitnya pusat kegiatan-kegiatan yang terbentuk dan beroperasinya kekuatan-kekuatan penentuan lokasi (*localization forces*) sangat bervariasi dari kota yang satu ke kota yang lain. Semakin besar kotanya, akan semakin banyak pula pusat-pusat kegiatan yang terbentuk dan akan semakin terspesialisasi.

- CBD
- Whole-sale lightmanufacturing
- Low-class residential
- Medium class residential
- High class residential
- Heavy manufacturing
- Outlying business district (OBD)

- Residential sub-urb
- Industrial sub-urb

Model diatas menunjukkan bahwa kota-kota besar akan mempunyai struktur yang terbentuk atas sel-sel (cellular structure) dimana penguna lahan yang berbeda-beda akan berkembang di sekitar titik-titik pertumbuhan (growing points) atau “niclei” didalam daerah perkotaan. Gambar diatas mengisaratkan adanya beberapa kesamaan dengan teori konsentris dan sektor.

Butir pertama adalah pada “setting” CBD yang relatif memang terletak ditengah sel-sel yang lain karna berfungsi sebagai salah satu “growing points”. Butir kedua mengenai perbatasan zone, 1,2,3,4,5 yang masing-masing berbatasan langsung dalam arti bahwa zone 1 berbatasan langsung dengan zone 2, zone 2 berbatasan langsung dengan zone 3 dan seterusnya. Butir 3 mengungkapkan adanya “distant decay principle” juga walau pada teori sektor hal ini sangat samar-samar namun pada teori pusat kegiatan ganda ide ini nampak lagi walau tidak sejelas pada teori konsentris. Butir 4 adalah keberadaan “zone permukiman klas rendah yang selalu berasosiasi dengan lokasi ”wholesale light manufacturing”. Ketersediaan lapangan pekerjaan, akomodasi yang murah kiranya mengarahkan terciptanya asosiasi.

Sementara itu beberapa perbedaan memang dapat terlihat. Butir pertama menyangkut lokasi CBD juga. Kalau dalam teori konsentris CBD bentuk terletak ditengah kota secara sempurna dalam artian jarak dari batas terluar kota relatif sama, namun teori sektor dan kegiatan ganda tidak lah demikian.

Butir kedua menyangkut jumlah CBD sebagai “growing points”. Dalam teori sektor dan konsentris terdapat satu CBD sebagai “growing points”.

Dalam teori konsentris terdapat satu CBD (unicentered theories), tetapi dalam teori pusat kegiatan ganda terdapat lebih dari businet district. Butir ketiga berhubungan dengan persebaran keruangnya. Dalam teori sektor bersifat sektoral dan modifikasi konsentris sedang sifat konsentris pada teori kegiatan ganda nampak samar, tetapi bersifat “celluler”.

6. Perkembangan Kawasan Pinggiran

Kegiatan pembangunan kota merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan secara keseluruhan dalam kerangka ruang dan waktu. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan kebutuhan yang selalu timbul berupa perkembangan kota yang berhubungan dengan perkembangan penduduk serta aktivitas atau kegiatan yang dilakukannya serta hubungannya dengan perkembangan daerah lainnya. Kota dipandang sebagai suatu obyek studi dimana didalamnya terdapat masyarakat manusia yang sangat kompleks (lihat Yunus, 2000). Untuk mendapatkan tempat tinggal di pusat kota saat ini sangat sulit terutama karena faktor harga yang relatif mahal. Maka bagi penduduk golongan menengah ke bawah solusinya adalah mencari tempat tinggal di daerah pinggiran kota dengan konsekuensi jauh dari tempat kerja atau tempat pendidikannya.

Secara teoritis pengertian daerah pinggiran menurut Freidman dan Alonso (2008), antara lain :

- a. Upward-transition regions, adalah daerah tepi dari pusat wilayah ini mengandung sumber-sumber atau resources yang dapat dikembangkan.
- b. Downward-transition regions, adalah daerah-daerah yang mengalami proses stagnasi dan kemunduran. (lihat Friedman and Allonso, 2008)

Sedang menurut McGee, 1985 (dalam Potter, 1998), wilayah pinggiran (periphery area) mempunyai ciri khas :

- a. Sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian (padi) dengan kepemilikan lahan sempit
- b. Mengalami transformasi kegiatan dari pertanian ke berbagai kegiatan non pertanian, termasuk perdagangan dan industri

Teori model Harris –Ullman (1945) menyebutkan bahwa zona tempat tinggal di daerah pinggiran membentuk komunitas tersendiri dalam artian lokasinya. Penduduk di daerah pinggiran sebagian besar bekerja di pusat – pusat kota dan zona ini semata – mata digunakan untuk sebagai tempat tinggal. Walaupun demikian daerah pinggiran semakin lama akan semakin berkembang dan menarik fungsi – fungsi lain juga, seperti pusat perbelanjaan, perkantoran dan sebagainya dan proses perkembangannya akan serupa dengan kota yang sudah ada. Daerah pinggiran adalah daerah yang letaknya berbatasan dengan daerah lain, baik itu merupakan daerah pusat kota maupun daerah sub pusat kota. (lihat Harris dan Ullman, 1945); (lihat juga Setiyohadi, 2008).

Pembangunan Kampus pendidikan tinggi dipilih pada daerah pinggiran yang masih tersedia lahan yang cukup luas bagi berdirinya kampus, disamping

juga menjauhkan lokasi kampus dari kebisingan. Keberadaan perguruan tinggi di daerah pinggiran ini tentu saja akan membawa perubahan yang tidak kecil terhadap daerah tempat perguruan tinggi tersebut berdiri termasuk aspek kehidupan masyarakat setempat.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2010) dengan judul “Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Karanganyar Provinsi JawaTengah”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas, analisis Gravitasi/Interaksi, analisis Tipologi Klassen dan analisis LQ. Dengan menggunakan analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas diperoleh terdapat tujuh kecamatan yang mempunyai hierarki dengan kategori tinggi keatas sebagai pusat pertumbuhan yaitu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Jaten, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Colomadu, Kecamatan Tawangmangun, Kecamatan Karangpandan, dan Kecamatan Gondang Rejo. Berdasarkan analisis tipologi klassen, diperoleh posisi perekonomian tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar adalah berada pada daerah yang relatif tertinggal (kuadran ketiga) kecuali Kecamatan Jaten, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Kebakkramat. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis Location Quation (LQ) diperoleh yang menjadi sektor basis di setiap kecamatan. Sektor Pertanian; Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; Sektor Bangunan; Sektor Perdagangan; Hotel dan Restoran adalah sektor basis di Kabupaten Karanganyar.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutikno dan Maryunani yang berjudul “Analisis Potensi dan Daya Saing Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kabupaten Malang. Alat analisis yang digunakan adalah analisis Tipologi Klassen, Location Quotient (LQ), Shift-Share (S-S), analisis Skalogram dan Analisis Daya Saing. Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen, diperoleh SWP yang ada di Kabupaten Malang dibagi atas empat pola pertumbuhan, yaitu SWP I merupakan daerah “berkembang cepat”, SWP II, III merupakan daerah “cepat tumbuh dan cepat maju”, SWP IV, VI, VII merupakan daerah “relatif tertinggal”, sementara SWP V, VIII adalah daerah “Maju tetapi tertekan”. Sementara berdasarkan analisis LQ dan Shift-Share yang dilakukan diperoleh bahwa struktur ekonomi di semua SWP didominasi oleh sektor tertier, kemudian primer dan sekunder. Sektor dominan kontribusinya terhadap PDRB masing-masing SWP adalah sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan serta hotel dan restoran. Berdasarkan analisis Skalogram, Daya saing dan Jarak yang dilakukan maka diperoleh gambaran masing-masing pusat pertumbuhan pada setiap SWP yakni ; 1) Kecamatan Ngantang merupakan kecamatan prioritas untuk SWP I; 2) Kecamatan Singosari merupakan kecamatan prioritas untuk SWP II Utara; 3) Kecamatan Pakisaji merupakan kecamatan prioritas untuk SWP II Selatan ; 4) Kecamatan Poncokusumu merupakan kecamatan prioritas untuk SWP IV; 5) Kecamatan Kepanjen merupakan kecamatan prioritas untuk SWP V; 6) Kecamatan Pagelaran merupakan kecamatan prioritas untuk SWP VII; 7) Kecamatan Turen merupakan kecamatan prioritas untuk SWP VIII.

Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin (2008) dengan judul “Penetapan Kawasan Andalan dan “Leading Sektor” Sebagai Pusat Pertumbuhan Pada Empat Koridor di Provinsi Jawa Timur”. Analisis yang digunakan adalah analisis Tipologi Klassen, analisis LQ, analisis SIG. Dari hasil analisis Tipologi Klassen diperoleh daerah yang berkembang cepat adalah Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Bojonegoro. Daerah yang tergolong maju adalah Kabupaten Sidoarjo, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Sumenep. Daerah yang berkembang cepat tetapi dengan pendapatan yang rendah adalah Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Bangkalan. Sementara, daerah yang relatif tertinggal adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan analisis LQ yang dilakukan, maka yang menjadi sektor unggulan adalah pertanian disusul listrik, gas dan air bersih, bangunan, jasa-jasa, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, angkutan dan komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan, serta pertambangan dan penggalian. Dengan hasil penggabungan antara LQ dan penggunaan SIG didapati yang menjadi daerah

pusat pertumbuhan di Koridor Utara Selatan adalah Kota Surabaya dan Kota Malang, untuk Koridor Barat Daya adalah Kota Kediri dan Kota Madiun, selanjutnya kawasan andalan sebagai pusat pertumbuhan di Koridor Timur adalah Kabupaten Jember dan Kota Probolinggo serta di Koridor Utara adalah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Sumenep.

Pandapotan T.P Nainggolan meneliti tentang Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun. Dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1 No. 12. Menggunakan metode analisis skalogram dan indeks sentralitas untuk menentukan pusat pertumbuhan, serta menggunakan analisis gravitasi untuk mengukur daya tarik yang dimiliki oleh suatu daerah atau besarnya interaksi antar daerah. Berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas yang dilakukan dengan menggunakan 30 jenis fasilitas yang dijadikan sebagai indikator terdapat 5 kecamatan yang ditetapkan sebagai kecamatan pusat pertumbuhan yaitu : Kecamatan Siantar, Bandar, Tanah Jawa, Raya dan Bosar Maligas. Kelima kecamatan tersebut memiliki nilai sentralitas yang lebih tinggi dari kecamatan lainnya.

Berdasarkan hasil analisis gravitasi menunjukkan bahwa kecamatan pusat pertumbuhan Siantar memiliki hubungan interaksi yang paling kuat dengan Kecamatan Gunung Malela sebagai wilayah hinterlandnya. Kecamatan pusat pertumbuhan Bandar memiliki hubungan interaksi yang paling kuat dengan Kecamatan Pematang Bandar. Kecamatan Tanah Jawa sebagai kecamatan pusat pertumbuhan memiliki hubungan interaksi yang paling kuat dengan Kecamatan Hatonduhan. Kecamatan pusat pertumbuhan selanjutnya

yakni Kecamatan Raya memiliki interaksi yang paling kuat dengan Kecamatan Panei sebagai kecamatan hinterlandnya. Dan kecamatan pusat pertumbuhan Bosar Maligas memiliki hubungan interaksi yang paling kuat dengan Kecamatan Bandar. Selain hubungan interaksi antara kecamatan pusat pertumbuhan dengan wilayah hinterlandnya, terdapat juga intraksi sesama kecamatan pusat pertumbuhan. Kecamatan pusat pertumbuhan yang memiliki hubungan interaksi dengan sesama kecamatan pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Tanah Jawa dengan Siantar dan Kecamatan Bandar dengan Bosar Maligas.

C. Rekonstruksi Teori dan Rumusan Variabel

Teori tempat sentral (central place theory) menganggap bahwa ada hirarki tempat (hierarchy of place). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan lainnya hanya sebagai daerah pemukiman. Dalam arahan RTRW Kabupaten Bone mengenai arahan pengembangan kawasan strategis perkotaan watampone sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial ekonomi, perdagangan dan jasa skala kabupaten yang berarti bahwa 27 kecamatan dalam batas administrasinya yang merupakan hinterlandnya akan mendapatkan pengaruhnya, sejauh mana Watampone sebagai PKW mampu melayani wilayah sekitarnya khususnya wilayah Palattae sebagai wilayah terjauh dan berpenduduk terbesar kedua setelah Watampone. Dilain sisi Palattae dengan

status sebagai pusat kegiatan local promosi (PKLp) dengan posisi geografis terletak lebih dekat dengan Balangnipa sebagai PKL. Menurut Christaller, Palattae merupakan hinterland dari Watampone dan juga Balangnipa karena kedua kota tersebut memberikan pengaruh bagi masyarakat yang ada di Palattae. Secara umum fenomena fungsi pelayanan Watampone terhadap Palattae ; dan Balangnipa terhadap Palattae dengan menggunakan pendekatan geografi, fenomena interaksi keruangan antara wilayah inti dan hinterlandnya yang terjadi pada ketiga wilayah tersebut tidak terlepas dari tiga faktor utama yaitu faktor wilayah saling melengkapi, kesempatan untuk berintervensi, dan juga kemudahan aksesibilitas. Ke tiga faktor diatas berkaitan dengan pendekatan teori carother yang menyebutkan “Kekuatan hubungan ekonomis antara dua tempat, berbanding lurus dengan besarnya (banyaknya) penduduk dan berbanding terbalik dengan jarak antaranya”. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, interaksi yang terjadi di antara ketiga kota ini dalam konteks interaksi wilayah pusat pelayanan dan wilayah disekitarnya dalam teori Randinelli di jelaskan karena terdapat tujuh keterkaitan diantaranya, Keterkaitan fisik (physical linkages), Keterkaitan ekonomi (economic linkages), Keterkaitan sosial (social linkages), Keterkaitan pergerakan penduduk (population movement linkages), Keterkaitan teknologi (technological linkages), Keterkaitan pelayanan sosial (service social linkages), dan Keterkaitan administrasi, politik dan kelembagaan. Dengan pertimbangan waktu, biaya dan tenaga maka dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga keterkaitan yaitu, keterkaitan fisik, keterkaitan ekonomi, keterkaitan pelayanan social, dan keterkaitan administrasi, politik dan

kelembagaan. Untuk lebih jelas keterkaitan serta unsur variabel yang di ukur dapat di lihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Unsur Keterkaitan Wilayah Dan Variabel Yang Di Ukur

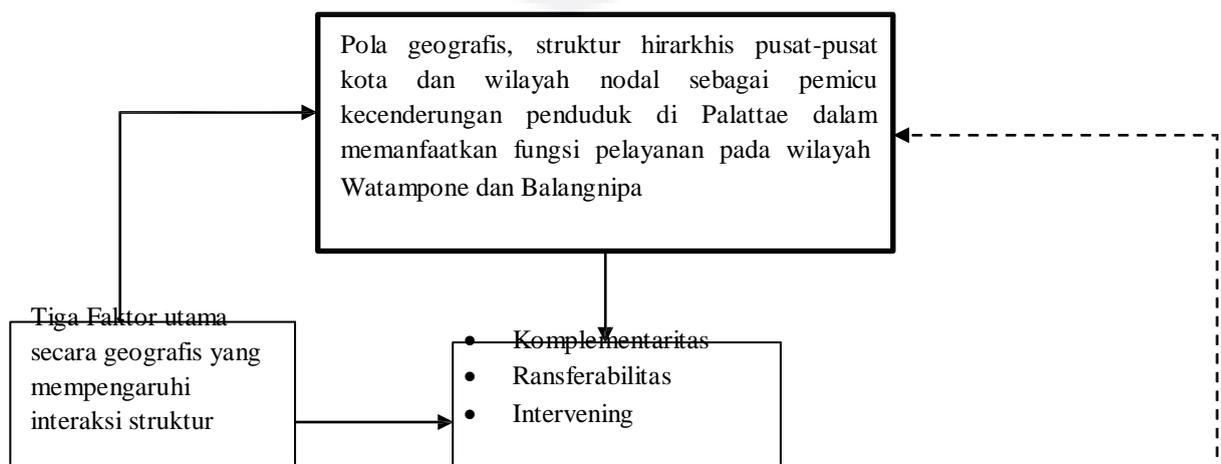
No	Unsur Keterkaitan wilayah	Variabel Yang Diukur
1	Keterkaitan Fisik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moda Transportasi ▪ Pemanfaatan Lahan
2	Keterkaitan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktifitas Ekonomi
3	Keterkaitan Fasilitas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Kesehatan ▪ Fasilitas Pendidikan

Sumber : Hasil Pengolahan Tahun 2018

D. Kerangka Pikir Penelitian.

Dalam arahan RTRW Kabupaten Bone mengenai arahan pengembangan kawasan strategis perkotaan watampone sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial ekonomi, perdagangan dan jasa skala kabupaten yang berarti bahwa 27 kecamatan dalam batas administrasinya yang merupakan hinterlandnya akan mendapatkan pengaruhnya, sejauh mana Watampone mampu melayani wilayah sekitarnya khususnya wilayah Palattae sebagai wilayah terjauh dan berpenduduk terbesar kedua setelah Watampone. Palattae dengan status sebagai pusat kegiatan local promosi (PKLp) dengan posisi sebagai hinterland dari Watampone yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) namun memiliki jarak yang cukup jauh, dilain sisi Kota Balangnipa yang berfungsi sebagai pusat pelayanan yang setingkat lebih rendah dari Watampone namun memiliki kedekatan jarak dengan Palattae sehingga mampu mengintervensi interaksi antara Watampone dan Palattae, Menurut Christaller, Palattae merupakan hinterland dari Watampone dan juga Balangnipa karena kedua kota tersebut memberikan pengaruh bagi masyarakat yang ada di Palattae. Secara umum fenomena fungsi

pelayanan Watampone dan Balangnipa terhadap Palattae dengan menggunakan pendekatan geografi, fenomena interaksi keruangan antara wilayah inti dan hinterlandnya yang terjadi pada ketiga wilayah tersebut tidak terlepas dari tiga faktor utama yaitu faktor wilayah saling melengkapi, kesempatan untuk berintervensi, dan juga kemudahan aksesibilitas. Ke tiga faktor diatas berkaitan dengan pendekatan teori carother yang menyebutkan “Kekuatan hubungan ekonomis antara dua tempat, berbanding lurus dengan besarnya (banyaknya) penduduk dan berbanding terbalik dengan jarak antaranya”. Interaksi yang terjadi di antara ketiga kota ini dalam konteks interaksi wilayah pusat pelayanan dan wilayah disekitarnya dalam teori Rondinelli di jelaskan karena terdapat tujuh keterkaitan yang empat keterkaitan diantaranya merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Empat variable tersebut diantaranya, Keterkaitan Fisik, Keterkaitan Ekonomi, Keterkaitan Fasilitas Sosial, Keterkaitan Administrasi, Politik dan Kelembagaan. Alur pemikiran dalam penelitian ini dapat di dilihat pada gambar 2.1





Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian kuantitatif sebagai metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap sebuah fenomena. Pengukuran yang dilakukan pada penelitian ini yaitu mengukur faktor yang mendeterminasi interaksi keruangan dengan menggunakan tiga keterkaitan menurut Teori Randinelli yaitu, keterkaitan aspek fisik, keterkaitan aspek ekonomi dan keterkaitan aspek sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, pada fenomena interaksi keruangan di jabarkan ke dalam beberapa komponen variabel. Setiap variable yang di tentukan di ukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variable tersebut. Dengan menggunakan simbol-symbol angka tersebut, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat di lakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter.

Tujuan utama dari metodologi ini ialah menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan generalisasi. Generalisasi ialah suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang di perkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu. Generalisasi dapat dihasilkan melalui suatu

metode perkiraan atau metode estimasi yang umum berlaku di dalam statistika induktif. Metode estimasi itu sendiri dilakukan berdasarkan pengukuran terhadap keadaan nyata yang lebih terbatas lingkupnya yang juga sering disebut *sample* dalam penelitian kuantitatif. Jadi, yang diukur dalam penelitian sebenarnya ialah bagian kecil dari populasi atau sering disebut “data”. Data ialah contoh nyata dari kenyataan yang dapat diprediksikan ketinggian realitas dengan menggunakan metodologi kuantitatif tertentu. Penelitian kuantitatif mengadakan eksplorasi lebih lanjut serta menemukan fakta dan menguji teori-teori yang timbul terkait dengan “Analisis Fungsi Pelayanan Watampone, Dan Balangnipa Terhadap Palattae”.

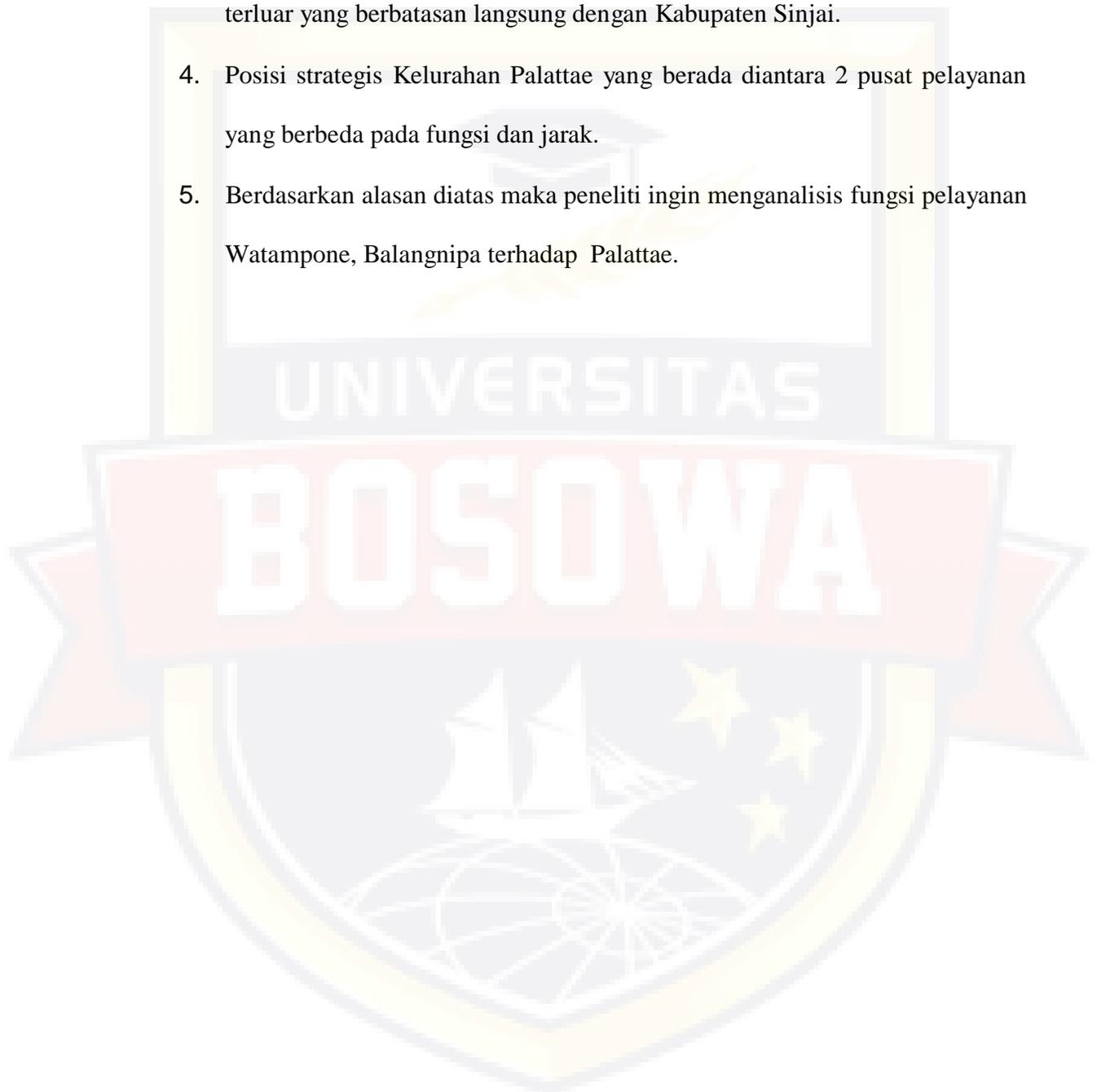
B. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah di Watampone, Balangnipa dan Palattae. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa :

1. Kota-kota tersebut memiliki kesamaan struktur masyarakat (sosial budaya), saling ketergantungan antar kota-kota (mobilitas ekonomi) dan aksesibilitas yang tergolong cukup mudah.
2. Penetapan Watampone, Balangnipa sebagai kawasan strategis dan atau sebagai Pusat pelayanan pemerintahan, sosial ekonomi, perdagangan dan jasa, dll dalam RTRW Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai.
3. Arah Palattae dalam RTRW Kabupaten Bone sebagai sub pusat pengembangan wilayah di bagian selatan Kabupaten Bone dengan jumlah

penduduk terbesar ke dua setelah Watampone sekaligus salah satu wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sinjai.

4. Posisi strategis Kelurahan Palattae yang berada diantara 2 pusat pelayanan yang berbeda pada fungsi dan jarak.
5. Berdasarkan alasan diatas maka peneliti ingin menganalisis fungsi pelayanan Watampone, Balangnipa terhadap Palattae.



C. Jenis dan Sumber Data.

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan kuantitatif, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Data Kuantitatif

Adalah data yang nilainya dalam bentuk angka. Adapun jenis data yang dimaksud adalah jumlah dari kepadatan penduduk, luas wilayah dan data lain yang terkait dengan penelitian ini.

b) Data Kualitatif.

Adalah data yang bernilai bukan angka. Adapun jenis data tersebut meliputi kondisi sarana dan prasarana, pola penggunaan lahan, kondisi fisik wilayah dan data lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sumber Data.

Adapun sumber data tersebut didapatkan dengan melakukan survey lapangan dan survey pada instansi terkait. Sumber data yang menjadi input penelitian ini adalah :

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari observasi lapangan seperti data yang diperoleh dari responden melalui kuisisioner dan observasi langsung lapangan.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi yang terkait seperti BAPPEDA, Dinas Tata Ruang, BPS Kabupaten/Kota, Kantor Desa dan Sebagainya.

D. Populasi dan Sampel.

1. Populasi.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono: 80:2013). Populasi dalam penelitian ini adalah semua penduduk Palattae. Karena penelitian ini berbasis pada data kuantitatif, maka peneliti menitik beratkan pada data statistik yang diperoleh dari lapangan dan lembaga-lembaga terkait didukung oleh pendapat dari masyarakat yang dianggap bisa mewakili keseluruhan penduduk khususnya yang ada di Palattae dengan jumlah penduduk secara keseluruhan yaitu 2.811 jiwa.

2. Sampel Penelitian.

a. Sampel.

Karena ukuran sampel telah diketahui maka Rumus Taro Yamane adalah rumus yang digunakan dalam penelitian ini, dengan persamaan: $n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$ (Sumber: Ansar 2015:31 dalam Riduan 2013 :65)

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

D = Derajat Kecermatan (level of significance), dalam studi ini nilai derajat kecermatan yang diambil adalah sebesar 10% sehingga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan studi sebesar 90%.

Jumlah populasi pada wilayah penelitian yaitu 1994 jiwa, dengan menggunakan rumus Taro Yamane maka banyaknya sampel pada penelitian ini yaitu;

$$\text{Jumlah Sampel} = \frac{N \cdot d}{1 + d(N-1)}$$

$$\text{Jumlah Sampel} = \frac{1994 \cdot 0,1}{1 + 0,1(1994-1)}$$

$$\text{Jumlah Sampel} = 95,22 = 95$$

Dari formulasi dengan menggunakan rumus Taro Yamane diatas maka jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 95 sampel.

b. Teknik Sampling.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *random sampling* yaitu teknik penentuan sampel secara acak sesuai yang dikehendaki peneliti (Sugiono, 2009). Random sampling atau sampel yang dipilih secara acak dengan pertimbangan bahwa setiap objek penelitian kemungkinan besar memiliki pengalaman yang sama terhadap masalah yang akan diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni:

1. Observasi lapangan, dengan melakukan kunjungan dan pengamatan langsung ke lapangan.
2. Wawancara, pengumpulan data dengan menyajikan beberapa pertanyaan dalam bentuk tertulis (angket) yang telah dipersiapkan sebelumnya.
3. Pendataan instansional, mengumpulkan data melalui instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif dan kualitatif obyek penelitian.
4. Telaah pustaka, peneliti mempelajari data, baik data kualitatif maupun data kuantitatif melalui sumber dokumen (Laporan, Monografi Daerah, Buku-buku, dan lainnya).
5. Dokumentasi, merupakan suatu proses pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.

F. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada tinjauan teori pada Bab II (tinjauan pustaka), untuk mengetahui fungsi pelayanan Watampone dan Balangnipa terhadap Palattae. Adapun variabel yang digunakan berdasarkan teori adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Variabel dan Indikator Penelitian

No	Unsur Keterkaitan Wilayah	Variabel Penelitian	No	Pernyataan (Indikator)	Jawaban	
					Setuju	Tidak Setuju
1	Keterkaitan Fisik	Aspek Transportasi	1	Kondisi prasarana jalan yang ada dipalattae sudah cukup baik		
			2	Sarana Transportasi dari dan menuju Palattae sudah cukup memadai		

			3	Waktu tempuh yang digunakan untuk mengakses Palattae dan sekitarnya semakin efisien		
		Pemanfaatan Lahan	4	Areal persawahan dan perkebunan masih lebih mendominasi daripada areal permukiman		
2	Keterkaitan Ekonomi	Aktifitas Ekonomi	1	Keberadaan pasar rakyat Balle cukup membantu bagi masyarakat di Palattae dan sekitarnya		
			2	Pasar rakyat Balle juga menguntungkan bagi pedagang lokal maupun non lokal		
			3	Padi, Kelapa dan kopi adalah beberapa hasil bumi yang dipasarkan ke watampone disamping hasil peternakan seperti sapi dan ayam buras.		
			4	Mata pencaharian sebagian besar penduduk palattae adalah petani dan pedagang.		
			5	Ketersediaan infrastruktur wilayah seperti toko bahan campuran, warung-warung makan, tempat penginapan, serta sarana hiburan di Palattae masih kurang		
			6	Pedagang ikan yang ada di Palattae memperoleh ikan untuk diperdagangkan dari TPI Lappa yang ada di Kabupaten Sinjai demikian pula sebaliknya pedagang yang ingin menjual dagangannya lebih memilih ke sinjai		
3	Keterkaitan Fasilitas Sosial	Fasilitas Kesehatan	1	Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sifatnya mendesak, masyarakat lebih memilih ke Balangnipa.		
			2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Ada Di Watampone Lebih Lengkap		

			3	Perguruan tinggi yang ada di Watampone cukup digemari oleh masyarakat Palattae		
		Fasilitas Pendidikan	4	Untuk pendidikan sekolah menengah ke bawah, sudah tersedia di Palattae dalam jumlah yang cukup sehingga tidak perlu ke luar Palattae.		

Sumber: HasilOlahan 2018

G. Metode Analisis

Metode pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian dengan menganalisis variabel yang berhubungan dengan menggunakan alat analisis (rumus) statistik dan matematis secara jelas akurat untuk menjawab pertanyaan. Alat analisis yang digunakan adalah :

1. Skala Guttman

Skala Guttman dikembangkan oleh Louis Guttman. Skala Guttman disebut juga dengan Scalogram atau analisis skala (Scale analysis). Menurut Sugiyono (2012 : 96) skala Guttman digunakan apabila ingin mendapatkan jawaban yang jelas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Dalam hal ini bagaimana kecenderungan pilihan penduduk Palattae dalam memanfaatkan fungsi pelayanan Watampone atau Balangnipa di sektor pendidikan, kesehatan, dan perdagangan (sosial ekonomi). Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator variabel tersebut dijadikan

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

2. Analisis Gravitasi

Dalam menganalisis Model Interaksi keruangan pendekatan untuk melihat atau menilai hubungan antar daerah yaitu dengan model gravitasi. Disini, daerah dianggap suatu massa. Hubungan antar daerah dipersamakan dengan hubungan antar massa. Massa wilayah juga mempunyai daya tarik, sehingga terjadi pengaruh-mempengaruhi antar daerah sebagai perwujudan kekuatan Tarik menarik antar daerah. Untuk melihat interaksi yang terjadi antara Kota Watampone dan Kota Balangnipa terhadap Kota Palattae sebagai lokasi penelitian dengan persamaan

$$I = \frac{P_1 \cdot P_2}{d^2}$$

Dimana :

I = Interaksi di antara kedua region

$P^1 P^2$ = Jumlah penduduk masing-masing region

d = Jarak di antara kedua region

Dimana kekuatan tarik menarik antara dua benda meningkat mengikuti produk massanya dan berkurang/ berbanding terbalik mengikuti distansi (jarak) antara keduanya.

H. Proposisi Penelitian

Adapun proposisi penelitian ini adalah kesimpulan sementara peneliti yaitu :

- Kemampuan suatu wilayah dalam melaksanakan fungsi pelayanan pada wilayah disekitarnya dipengaruhi oleh factor region yang saling melengkapi (*region Complementary*), Kesempatan berintervensi (*Intervening Opportunity*) dan Kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang (*Spatial Transferability*).

I. Defenisi Operasional

Pentingnya defenisi operasional terhadap variabel penelitian, agar tidak terjadi pembiasan dalam menginterpretasikan maksud dari suatu variabel dalam penelitian, selain itu kita bisa fokus terhadap objek dan subyek dalam penelitian :

1. Karakteristik penduduk adalah gambaran tentang komposisi penduduk di wilayah penelitian yang diukur dengan jumlah penduduk.
2. Jarak antar wilayah adalah jauhnya satu kota dengan kota lainnya di wilayah penelitian yang diukur dengan kilometer.
3. Tingkat pergerakan/aktivitas penduduk adalah kegiatan penduduk di wilayah penelitian yang diukur dengan banyaknya jenis pekerjaan.
4. Jumlah ketersediaan fasilitas (pendidikan, kesehatan, ekonomi) banyaknya ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi di wilayah penelitian yang diukur dengan jumlah fasilitas dalam satuan unit.
5. Aspek Transportasi

6. Jarak Tempuh dalam penelitian ini yaitu, ukuran yang digunakan untuk mengukur jauh dekatnya daerah asal menuju daerah tujuan
7. Waktu Tempuh dalam penelitian ini yaitu, ukuran dengan menggunakan waktu untuk mengukur jarak daerah asal menuju daerah tujuan
8. Aktifitas Ekonomi dalam penelitian ini yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Palattae di Wilayah perkotaan Watampone Maupun Balangnipa dalam memenuhi kebutuhan ekonomi
9. Fasilitas Kesehatan dalam penelitian ini yaitu, sarana penunjang kegiatan pada sector kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, dll).
10. Fasilitas Pendidikan dalam penelitian ini yaitu, Sarana penunjang aktifitas belajar mengajar berupa Gedung Sekolah maupun kelengkapan lainnya.
11. Administrasi Pemerintahan dalam penelitian ini yaitu mencakup kegiatan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan pada pusat aktifitas pemerintahan wilayah perkotaan Watampone sebagai ibukota Kabupaten Bone.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Batas dan Luas Wilayah Kabupaten Bone

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bone terletak di bagian Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan bagian Barat Teluk Bone dengan potensi sumberdaya alam yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan, disamping memiliki luas wilayah yang relatif luas. Kabupaten Bone secara astronomis terletak $04^{\circ} 13'$ sampai $05^{\circ} 06'$ Lintang Selatan (LS) dan $119^{\circ} 42'$ sampai $120^{\circ} 40'$ Bujur Timur (BT), yang berada di pantai Timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.

Ibukota Kabupaten Bone adalah Kota Watampone yang terletak 174 km arah timur dari Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559,00 km². Secara administrasi pemerintahan wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi (27) dua puluh tujuh kecamatan, yang terdiri dari 333 desa dan 39 kelurahan. Tiga kecamatan

diantaranya merupakan wilayah perkotaan Watampone, yaitu Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang, dan Tanete Riattang Timur. Secara rinci luas masing-masing kecamatan di Kabupaten Bone. Untuk lebih jelasnya lihat table 4.1.

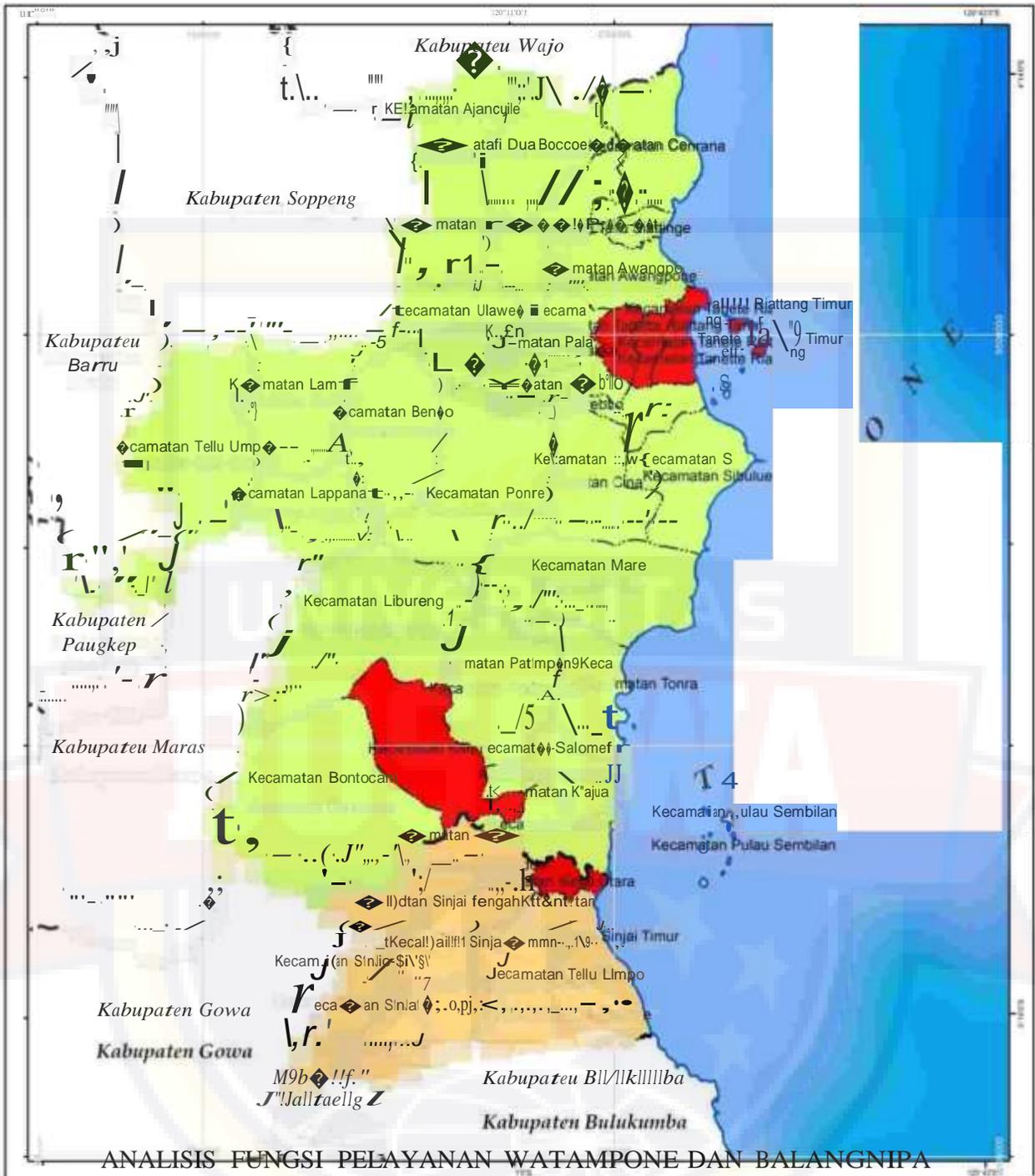
Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bone Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Bontocani	463,35	10.16
2	Kahu	189,50	4.16
3	Kajuara	124,13	2.72
4	Salomekko	84,91	1.86
5	Tonra	200,32	4.39
6	Patimpeng	130,47	2.86
7	Libureng	344,25	7.55
8	Mare	263,50	5.78
9	Sibulue	155,80	3.42
10	Cina	147,50	3.24
11	Barebbo	114,20	2.50
12	Ponre	293,00	6.43
13	Lappariaja	138,00	3.03
14	Lamuru	208,00	4.56
15	Tellu Limpoe	318,10	6.98
16	Bengo	164,00	3.60
17	Ulaweng	161,67	3.55
18	Palakka	115,32	2.53
19	Awangpone	110,70	2.43
20	Tellu Siattinge	159,30	3.49
21	Amali	119,13	2.61
22	Ajangale	139,00	3.05
23	Dua Boccoe	144,90	3.18
24	Cenrana	143,60	3.15
25	Tanete Riattang Barat	53,68	1.18

26	Tanete Riattang	23,79	0.52
27	Tanete Riattang Timur	48,88	1.07
Jumlah		4.559,00	100

Sumber : BPS Kabupaten Bone, Tahun 2017





ANALISIS FUNGSI PELAYANAN WATAMPONE DAN BALANGNIPA TERHADAP PALATTAE

<p>Karya : Prof. DR. Ir. Tommy S.S.EIMMO, Mu.</p> <p>B-111 AdministrtiHl</p> <p>Wilayah Administrtfki Kabuptttn</p>	<p>1:430 000</p> <p>1000m</p> <p>10000m</p>	<p>Wilayah Pnti01n</p> <p>Mi,y,ii</p> <p>GM-P,...</p>	
<p>PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA</p> <p>PROGMM PALCATAUAMA</p> <p>Anggota : Dr. Ir. Ait R...ution, M.St</p>	<p>Informasi Kontak</p> <p>Profil : Transmisional Marabatu</p> <p>Alamat : Gedung Sate, Jl. Sekeloa Tengah No. 40, Bandung 40132</p> <p>Anggota : Dr. Ir. Ait R...ution, M.St</p>	<p>Peraltrn</p> <p>GM-P,...</p>	<p>1:430 000</p> <p>1000m</p> <p>10000m</p>

PETA ORIENTASI PENELITIAN

Nama : A. T...nt Mul...n llyM
 NIM : MPW 4515 020

2. Topografi dan Kelerengan Wilayah

Wilayah Kabupaten Bone terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan daerah perbukitan dengan variasi ketinggian dari permukaan laut 0 meter hingga lebih dari 1.000 meter. Kondisi permukaan lahan bervariasi mulai dari landai, bergelombang hingga curam.

Tabel 4.2:
Luas Wilayah Menurut Ketinggian Di Kabupaten Bone, Tahun 2016

No	Kelas Ketinggian	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase (%)
1	0 – 25	81.925,2	17,97
2	25 – 100	101.620,0	22,29
3	100 – 250	202.237,2	44,36
4	250 – 750	62.640,6	13,74
5	750 – 1000	40.080,0	13,76
6	>1000	6.900,0	1,52

Sumber : BPS Kabupaten Bone, Tahun 2016

Daerah datar dengan kemiringan lereng 0-2% memiliki luas terbesar yakni 164.602 Ha, daerah landai hingga sedikit bergelombang tersebar di sepanjang pantai dan bagian Utara seluas 91.519 Ha, dan di bagian Barat dan Selatan pada umumnya merupakan wilayah bergelombang dengan kemiringan 15-40% seluas 12.399 Ha, sedangkan wilayah curam >40% dengan luas 12.399 Ha. Tabel 2.11 dan 2.12 memperlihatkan secara rinci kelas ketinggian dan kelas kemiringan wilayah berdasarkan luas wilayah dan secara jelas dapat dilihat pada Gambar berikut.

Tabel 4.3:
Luas Wilayah Menurut Kemiringan Lereng Di Kabupaten Bone, Tahun 2014

No	Kelas Kemiringan Lereng (%)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase (%)
1	0 – 2 (datar)	164.602	36,1
2	0 – 15 (landai & sedikit bergelombang)	91.519	20,07
3	15 – 40 (bergelombang)	12.399	24,65
4	>40 (curam)	12.399	24,65

Sumber : BPS Kabupaten Bone, Tahun 2016

3. Geohidrologi

Pada wilayah Kabupaten Bone terdapat juga pegunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisi sungai yang berair pada musim hujan kurang lebih 90 buah. Namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar, seperti Sungai Walanae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulubulu, Salomekko, Tobunne dan Sungai Lekoballo. Lebih Jelasnya pada Gambar berikut.

Tabel 4.4:
Sungai-Sungai di Kabupaten Bone, Tahun 2016

No	Nama Sungai	Hulu	Muara	Manfaat	Daerah yg Dilalui
1	Cenrana	D.Tempe	Palime	Perikanan	Wajo-Bone
2	Walanna	Bontocani	T.Bone	Perikanan	Bone-Soppeng
3	Palakka	Kec.Ponre	D.Tempe	Pertanian	Bone
4	Pattiro	Kec.Ponre	T.Bone	Pertanian	Bone
5	Jaling	Kec.Ponre	T.Bone	Pertanian	Bone
6	Unyi	Kec.Ponre	D.Tempe	Pertanian	Bone
7	Maradda	Bontocani	S.Cenrana	Pertanian	Bone

8	Lerang	Kec.Ponre	S.Cenrana	Pertanian	Bone
9	Pallengoreng	Wollangi	T.Bone	Pertanian	Bone
10	Bengo	Kec.Ponre	T.Bone	Pertanian	Bone
11	Malinrung	Kec.Ponre	S.Walanae	Pertanian	Bone
12	Dekko	Kec.Ponre	S.Walanae	Pertanian	Bone
13	Melle	Kec.Ponre	T.Bone	Pertanian	Bone
14	Seko Balle	Kec.Libureng	S.Walanae	Pertanian	Bone
15	Coppo Bulu	Kec.Ponre	S.Walanae	Pertanian	Bone
16	Tanete Buang	Kec.Ponre	T.Bone	Pertanian	Bone
17	Mico	Kec.Ponre	T.Bone	Pertanian	Bone
18	Packing	Kec.Palakka	T.Bone	Pertanian	Bone
19	Corowali	Kec.Barebbo	T.Bone	Pertanian	Bone

Sumber : BPS Kabupaten Bone, Tahun 2016

4. Kondisi Geologi

Potensi geologi diperlihatkan dengan terdapatnya potensi pertambangan di Kabupaten Bone yang cukup besar terdiri dari emas, batu bara, pasir silika, tembaga, mangan, endapan besi, batu gamping, marmer, pasir kuarsa dan lain-lain. Namun, sampai saat ini potensi yang ada belum ada yang diolah. Selain kondisi geologi, kondisi jenis tanah yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari tanah Aluvial, Gleyhumus, Litosol, Regosol, Grumosol, Mediteran dan Renzina. Jenis tanah didominasi oleh tanah Mediteran seluas 67,6% dari total wilayah, kemudian Renzina 9,59% dan Litosol 9%. Penyebaran jenis tanahnya dapat dijelaskan sebagai berikut : sepanjang Pantai Timur Teluk Bone ditemukan tanah Aluvial dengan kedalaman efektif tanah di Kabupaten Bone terbagi dalam empat kelas yaitu :

- 0-30 cm seluas 120.505 Ha (26,44 %)
- 30-60 cm seluas 120.830 Ha (26,50 %)

- 60-90 cm seluas 30.825 Ha (6,76 %)
- Lebih besar dari 90 cm seluas 183.740 Ha (40,30 %).

5. Klimatologi

Kondisi klimatologis wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah yang beriklim sedang dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 95% - 99% dengan temperatur berkisar 26OC – 43OC. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone.

Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Ratarata curah hujan tahunan di wilayah Bone bervariasi, yaitu: rata-rata < 1.750 mm; 1750-2000 mm; 2000-2500 mm dan 2500-3000 mm.

Pada periode April-September angin bertiup dari timur dengan membawa hujan sehingga terjadi musim hujan dan sebaliknya pada bulan Oktober-Maret bertiup angin barat di saat Kabupaten Bone mengalami musim kemarau. Suhu cukup tinggi rata-rata terjadi pada bulan Januari dan terendah pada bulan Agustus di musim kemarau.

6. Pemanfaatan Lahan Kabupaten Bone

Analisis kesesuaian lahan untuk tanaman budidaya dilakukan pada areal diluar kawasan lindung, baik pada kawasan budidaya hutan yaitu pada areal

kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas, maupun areal penggunaan lain (APL) yang berupa lahan milik masyarakat. Peta sebaran kawasan lindung, kawasan budidaya hutan dan kawasan budidaya tanaman pertanian Kabupaten Bone.

Luas kawasan lindung hanya mencapai 42.436,38 ha atau sekitar 9,3 % dari total luas wilayah Kabupaten Bone yang mencapai 457.808,68 ha, dibandingkan dengan luas kawasan budidaya yang mencapai 415.372,30 ha atau 90,7 % dari total luas wilayah kabupaten. Kawasan budidaya tersebut terdiri dari kawasan budidaya tanaman pertanian seluas 318.035,18 ha dan kawasan budidaya tanaman kehutanan seluas 97.337,12 ha.

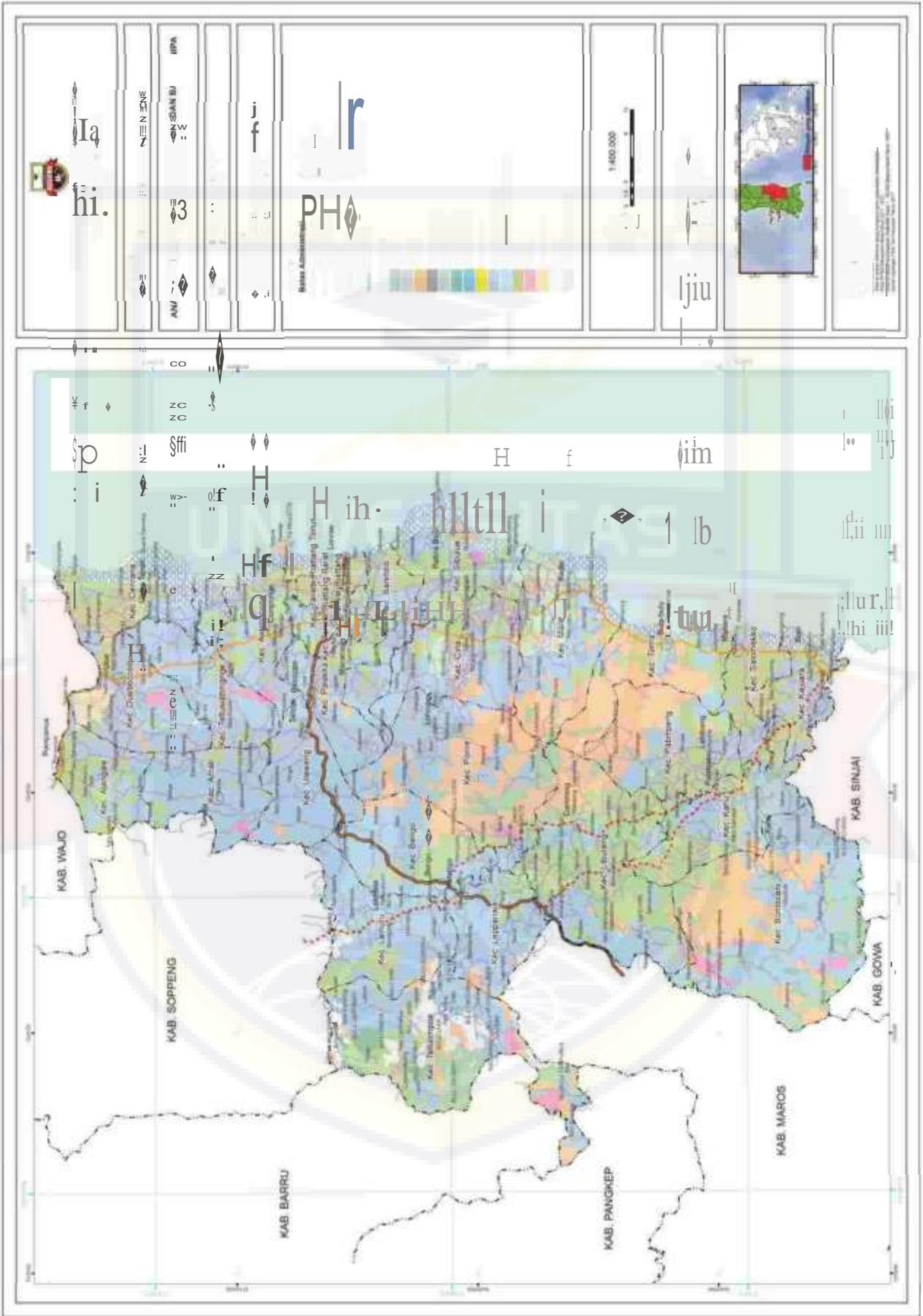
Analisis kesesuaian lahan pada kawasan budidaya, dilakukan berdasarkan sistem lahan. Wilayah Kabupaten Bone, terdiri dari 28 sistem lahan, dimana setiap sistem lahan tersebut mempunyai kemampuan yang berbeda untuk mendukung berbagai kegiatan budi daya, baik budi daya pertanian, perkebunan maupun kehutanan. Sebaran sistem lahan pada wilayah Kabupaten Bone.

Sistem lahan terluas adalah sistem lahan Bukit Balang (BBG) yang luasnya mencapai 96.061,70 ha, sedangkan yang terkecil adalah sistem Koto Tinggi (KTT) dengan luas hanya mencapai 49,19 ha. Luas areal setiap tipe sistem lahan di wilayah Kabupaten Bone lebih jelasnya lihat table 4.5.

Tabel 4.5.**Luas dan Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Bone**

No	Nama	Sistem Lahan	Luas (ha)
1	Puting (PTG)	Pantai	173,25
2	Kajapah (KJP)	Rawa Pasang Surut	372,55
3	Klaru (KLR)	Rawa	256,37
4	Kahayan (KHY)	Dataran Alluvial	57.614,11
5	Bakunan (BKN)	Lembah Alluvial	1.110,60
6	Muna (MNA)	Dataran	8.232,88
7	Barong Tongko (BTK)	Dataran	4.977,33
8	Gunung Baju (GBJ)	Dataran	5.751,31
9	Kapor (KPR)	Dataran	1.550,55
10	Sungai Aur (SAR)	Dataran	69.233,66
11	Teweh (TWH)	Dataran	2.409,53
12	Watampone (WTE)	Dataran	80.766,59
13	Air Hitam Kanan (AHK)	Perbukitan	24.493,60
14	Kalung (KLG)	Perbukitan	9.179,80
15	Lampe (LME)	Perbukitan	279,68
16	Lantang (LTG)	Perbukitan	60,68
17	Bukit Masung (BMS)	Perbukitan	38.851,68
18	Maput (MPT)	Perbukitan	14.032,68
19	Salo Marana (SMA)	Perbukitan	1.275,53
20	Tiro (TRO)	Perbukitan	51,05
21	Bukit Balang (BBG)	Pegunungan	96.061,70
22	Bukit Ayun (BYN)	Pegunungan	6.312,67
23	Okki (OKI)	Pegunungan	22.397,09
24	Pandreh (PDH)	Pegunungan	4.201,37
25	Kuranji (KNJ)	Kipas dan Lahar	554,60
26	Koto Tinggi (KTT)	Kipas dan Lahar	49,19
27	Lubuk Sikaping (LBS)	Kipas dan Lahar	4.694,05
28	Palu (PLU)	Kipas dan Lahar	3.141,45
Jumlah			458.085,57

Sumber: RTRW Kab. Bone 2011-2031



7. Aspek Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Bone pada akhir tahun 2016 berjumlah 746.973 jiwa yang terdistribusi pada 27 kecamatan, dengan tingkat persebaran yang tidak merata pada setiap kecamatan. Distribusi penduduk sebagian besar pada kawasan perkotaan, terutama di Kawasan Perkotaan Watampone yang terdiri atas Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, dan Tanete Riattang Timur. Distribusi jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tanete Riattang dengan jumlah sebesar 52.171 jiwa atau sekitar 6,98% dari jumlah penduduk kabupaten, sedangkan distribusi penduduk terkecil adalah Kecamatan Tonra dengan jumlah penduduk kurang lebih 13.651 jiwa atau sekitar 1,82% dari jumlah penduduk Kabupaten Bone. Untuk lebih jelas lihat tabel 4.6.

Tabel 4.6
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Perkecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2016

No	Kecamatan	Penduduk	Kepadatan Penduduk	Persentase (%)
1	Bontocani	15.719	33,92	2,10
2	Kahu	38.761	204,54	5,19
3	Kajuara	36.435	293,52	4,88
4	Salomekko	15.539	183,01	2,08
5	Tonra	13.651	68,15	1,83
6	Patimpeng	16.577	127,06	2,22
7	Libureng	29.908	86,88	4,00
8	Mare	26.733	101,45	3,58
9	Sibulue	34.206	219,55	4,58
10	Cina	26.499	179,32	3,55
11	Barebbo	27.580	241,51	3,69

12	Ponre	13.873	47,35	1,86
13	Lappariaja	23.824	172,64	3,19
14	Lamuru	24.969	120,04	3,34
15	Tellulimpoe	14.097	44,32	1,89
16	Bengo	25.481	155,37	3,41
17	Ulaweng	24.731	152,97	3,31
18	Palakka	22.639	196,31	3,03
19	Awangpone	29.386	265,46	3,93
20	Tellusiattinge	40.087	251,64	5,37
21	Amali	20.731	174,02	2,78
22	Ajangale	27.441	197,42	3,67
23	Dua Baccoe	30.207	208,47	4,04
24	Cenrana	24.155	168,21	3,23
25	Tanete Riattang Barat	48.438	902,35	6,48
26	Tanete Riattang	52.171	2192,98	6,98
27	Tanate Riattang Timur	43.185	883,49	5,78
Jumlah		747.023	163,85	100

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka 2017

8. Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayah

a. Permukiman

Kepadatan hunian berpengaruh terhadap kesehatan. Peluang terjadinya penularan penyakit semakin tinggi pada ruangan yang jumlah penghuninya padat. Tahun 2016, masih ada sekitar 3,35 persen rumah tangga dengan luas lantai per kapita tidak lebih dari 7,2 m².

Rumah panggung mendominasi tempat tinggal rumah tangga di Bone. Kondisi ini ditunjukkan oleh rumah dengan jenis dinding terluas yang dimiliki lebih dari setengah rumah tangga (53,3 persen) adalah kayu.

Demikian pula dengan jenis lantai. Sebanyak 61 persen rumah tangga memiliki rumah dengan lantai terbuat dari bahan kayu/papan. Papan tersebut terbagi menjadi dua kualitas, yaitu kualitas tinggi dan kualitas rendah. Sebanyak 38,83 persen rumah tangga di Bone menggunakan papan kualitas rendah untuk lantainya. Sedangkan papan kualitas tinggi digunakan sekitar 11,31 persen rumah tangga. Lantai yang terbuat dari papan kualitas tinggi dimiliki oleh rumah tangga yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi. Dengan demikian, indikator-indikator perumahan di Bone khususnya jenis dinding dan lantai tidak secara langsung menunjukkan kondisi ekonomi (*Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka Tahun 2017*).

b. Fasilitas Pendidikan

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta memacu motivasi belajar harus ditunjang dengan ketersediaan sarana pendidikan yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Untuk mencapai upaya tersebut, hingga saat ini di Kabupaten Bone tersedia beberapa fasilitas pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat lanjutan atas. Tahun 2016 jumlah sekolah di Kabupaten Bone sebanyak 745 Sekolah Dasar (SD) sederajat, 213 Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, 99 Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Setiap kecamatan telah memiliki sekolah dengan berbagai jenjang. Kecamatan Barebbo

tercatat hanya memiliki satu SMK tanpa adanya SMA dan Madrasah Aliyah.

Untuk lebih jelasnya lihat table 4.7.

Tabel 4.7
Jumlah Fasilitas, Murid, Guru dan Rasio Pendidikan di Kabupaten Bone
Tahun 2016

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Fasilitas (Unit)	Murid	Guru	Rasio
1	SD Sederajat	745	86.550	6.555	13,20
2	SMP Sederajat	213	40.699	3.425	11,88
3	SMA Sederajat	99	30.033	2.619	11,47
Jumlah		1057	157.282	12.599	

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka Tahun 2017

c. Fasilitas Kesehatan

Sistem distribusi pelayanan kesehatan sangat ditentukan jenis dan banyaknya fasilitas kesehatan yang tersedia, yang ditunjang oleh peralatan dan tenaga medis yang memadai, serta mobilisasi obat-obatan. Hingga saat ini pelayanan kesehatan di Kabupaten Bone ditunjang oleh ketersediaan fasilitas berupa rumah sakit, puskesmas, pustu, posyandu dan klinik, dengan pelayanan yang masih terbatas.

Ditinjau dari sisi *supply*, pada tahun 2016 terdapat 38 Puskesmas di Kabupaten Bone. Setiap kecamatan memiliki paling tidak satu Puskesmas. Selain itu, di Bone terdapat 3 rumah sakit, 1 rumah bersalin, 70 Pustu,

156 Poskesdes, 942 Posyandu, dan 13 klinik. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4.8.

Tabel 4.8
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bone Tahun 2016

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas (Unit)
1	Rumah Sakit	3
2	Rumah Sakit Bersalin	1
3	Puskesmas	27
4	Pustu	70
5	Poskesdes	156
6	Posyandu	942
7	Klinik	13
Jumlah		1212

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka Tahun 2017

d. Fasilitas Perdagangan

Penyediaan sarana perdagangan diarahkan sebagai pusat distribusi dan asosiasi dalam pembentukan pola pemasaran hasil-hasil produksi kegiatan ekonomi masyarakat. Keberadaan fasilitas tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, demikian halnya dalam pemasaran hasil dari sentra produksi terkonsentrasi dalam satu sistem pelayanan pasar. Jumlah perusahaan yang memperoleh surat izin usaha perdagangan menurut golongan usaha sebanyak 1.225 usaha yang terdiri dari 1.177 usaha

perdagangan kecil, dan 48 usaha perdagangan menengah. (*Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka Tahun 2017*).

e. Transportasi

Salah satu prasarana angkutan darat adalah jalan. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Bone adalah 2.782,48 km, terdiri atas jalan kabupaten sepanjang 2.481,6 km, jalan negara sepanjang 123,18 km, dan jalan provinsi sepanjang 177,7 km. Tahun 2016, persentase jalan yang diaspal baru mencapai 38,06 persen. Selama 2014 hingga 2016 jumlah kendaraan terus bertambah untuk semua jenis kendaraan. Sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang paling banyak dimiliki penduduk Bone. Tahun 2016, tercatat 149.675 sepeda motor digunakan oleh penduduk Bone. (*Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka Tahun 2017*).

9. Struktur dan Kontribusi Sektor Perekonomian

Kondisi perekonomian suatu wilayah sangat tergantung pada potensi dan sumberdaya yang dimiliki, serta upaya untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Perkembangan ekonomi Kabupaten Bone dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan angka PDRB yang selalu mengalami peningkatan. Nilai PDRB merupakan ciri perekonomian suatu wilayah yang ditunjukkan oleh kontribusi masing-masing sektor kegiatan sebagai gambaran dari struktur ekonomi suatu wilayah.

Produk domestik regional bruto (PDRB) dapat memberikan gambaran tentang kemajuan ekonomi suatu daerah dengan mendefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa dalam periode tertentu (1 tahun). Pada Tahun 2016, 17 sektor ekonomi penggerak Kabupaten Bone memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar Rp. 26.414.528,9 milyar dengan pendapatan perkapita penduduk sebesar Rp. 3.934.523.

Tabel 4.9

**Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bone (Juta Rp) Tahun 2014 – 2016
(2010=100)**

No	Lapangan Usaha	2014	2015*)	2016*)
1	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	9.815.106,6	11.471.120,3	13.125.713,4
2	Pertambangan & Galian	664.942,1	866.105,8	985.687,6
3	Industri Pengolahan	1.379.734,4	1.615.161,9	1.791.530,6
4	Pengadaan Listrik & Gas	18.229,4	17.415,5	20.107,8
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	7.868,6	8.095,4	8.729,9
6	Konstruksi	1.899.379,0	2.235.912,1	2.553.215,0
7	Perdagangan Besar Dan Eceran	2.212.186,5	2.555.955,8	3.045.777,0
8	Transportasi Dan Pergudangan	473.860,9	589.663,3	595.117,7
9	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	108.691,4	118.089,7	129.814,3
10	Informasi Dan Komunikasi	297.932,0	312.847,4	358.496,4
11	Jasa Keuangan & Asuransi	612.706,8	699.082,6	813.213,8
12	Real Estate	752.423,5	885.067,5	979.272,9
13	Jasa Perusahaan	12.900,7	14.583,4	15.945,3
14	Administrasi Pemerintahan,	909.188,60	1.099.818,22	1.127.272,6

	Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib			
15	Jasa Pendidikan	466.511,3	520.233,7	558.994,5
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	170.728,1	199.310,8	220.700,8
17	Jasa Lainnya	64.555,4	75.005,0	84.939,2
Produk Domestik Regional Bruto		19.866.945,3	23.283.468,7	26.414.528,9

Sumber: Kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2017

B. Kawasan Perkotaan Watampone

1. Kedudukan Watampone dalam Rencana Tata Ruang Wiayah (RTRW)

Kabupaten Bone

Dalam struktur ruang secara nasional dan regional (RTRWN dan RTRWP Sulawesi Selatan), kawasan perkotaan Watampone ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Sulawesi Selatan. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa fungsi Kota Watampone, selain sebagai pusat pelayanan terhadap wilayah Kabupaten Bone (ibukota Kabupaten) juga memberikan fungsi pelayanan terhadap wilayah disekitarnya, ataupun mampu saling berinteraksi dalam sistem pelayanan yang saling terkait terhadap beberapa wilayah sekitar. Sedangkan dalam sistem kewilayahan, diharapkan fungsi Kawasan Perkotaan Watampone dapat mendorong pertumbuhan wilayah sekitar, terkait dengan sistem distribusi dan pelayanan sarana dan prasarana wilayah. Dengan demikian, setidaknya mampu memberikan interaksi dalam sistem perdagangan dan sistem transportasi

sehingga pemenuhan kebutuhan dapat terwujud dalam sistem desentralisasi, yang sesuai dengan fungsi ruang kawasan perkotaan sebagai PKW.

Tabel 4.10

Lingkup Wilayah Kawasan Perkotaan Watampone Kabupaten Bone

No	Kawasan Perkotaan Watampone	Sistem pelayanan	Peran fungsi Utama
1	Kec. Tanete Riattang	PKW	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kota Kabupaten ▪ Pusat Pemerintahan Kabupaten ▪ Pusat Pelayanan Sosial dan Ekonomi kabupaten
2	Kec. Tanete Riattang Timur		
3	Kec. Tanete Riattang Barat		

Sumber : RDTR Kawasan Perkotaan Watampone

2. Administrasi Dan Letak Geografis

Dilihat dari luas wilayah untuk 3 (Tiga) Kecamatan yang di proyeksikan di Kabupaten Bone yaitu pertama Kecamatan Tanete Riattang Barat luas area mencapai 53,68 (km²) atau sekitar 1,18 persen terdapat 8 kelurahan di wilayah ini. Kecamatan Tanete Riattang luas kecamatan ini yaitu 23,79(km²) atau sekitar 0,52 persen dan terdapat 8 kelurahan. Yang ketiga yaitu Kecamatan Tanete Riattang Timur luas wilayah ini mencapai 48,88(km²) atau sekitar 1,07 persen dan terdapat 8 kelurahan. Secara geografis Kawasan Perkotaan Watampone berada pada:

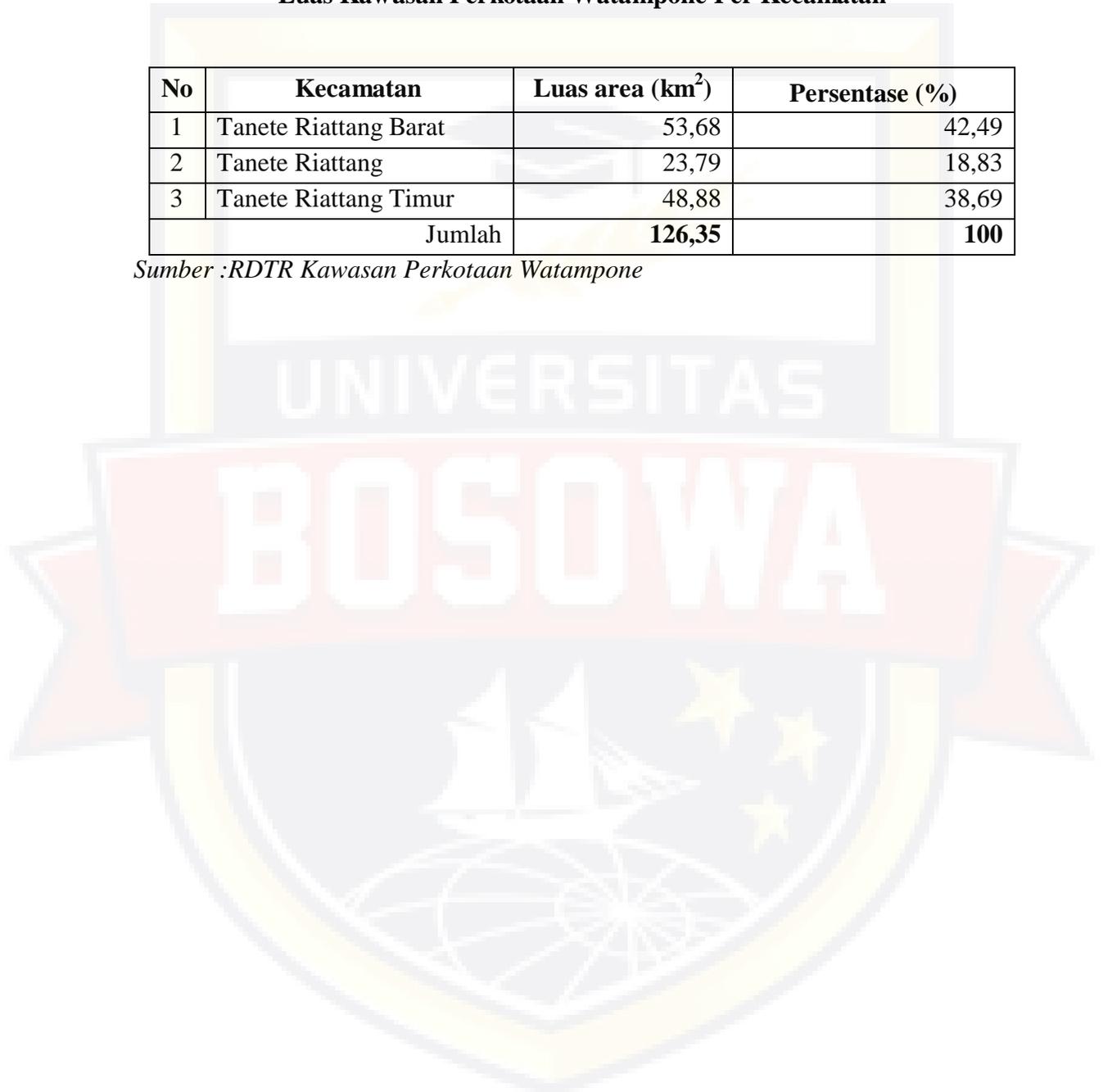
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Teluk Bone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Barebbo
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Palakka
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Awangpone

Tabel 4.11

Luas Kawasan Perkotaan Watampone Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas area (km²)	Persentase (%)
1	Tanete Riattang Barat	53,68	42,49
2	Tanete Riattang	23,79	18,83
3	Tanete Riattang Timur	48,88	38,69
	Jumlah	126,35	100

Sumber :RDTR Kawasan Perkotaan Watampone



3. Aspek Kependudukan Kawasan Perkotaan Watampone

Keberadaan penduduk di suatu daerah sangat penting karena penduduk merupakan modal utama pembangunan. Penduduk berperan sebagai otak dan agen pelaksana pembangunan. Dengan mengetahui kondisi kependudukan, memungkinkan perencanaan pembangunan akan lebih tepat dan terarah. Jumlah penduduk Kawasan Perkotaan Watampone pada tahun 2015 yaitu 142.199 jiwa yang terdiri atas 68.599 jiwa penduduk laki laki dan 73.600 jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4.12.

Tabel 4.12

Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Watampone Tahun 2016

No	Wilayah Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tanete Riattang Barat	22.928	24.810	47.738
2	Tanete Riattang	24.285	27.379	51.664
3	Tanete Riattang Timur	21.386	21.411	42.797
Jumlah		68.599	73.600	142.199

Sumber: Kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2016

4. Aspek Sarana Prasarana Kawasan Perkotaan Watampone

a. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jika dilihat dari segi fungsi bangunan, sebagian besar bangunan digunakan sesuai peruntukannya sebagai tempat tinggal atau tempat usaha. Seiring dengan tuntutan kegiatan ekonomi masyarakat, beberapa bangunan yang statusnya sebagai rumah tempat tinggal dimanfaatkan sebagai tempat usaha dan hal ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu

seluruh bangunan digunakan untuk usaha dan sebagian hanya digunakan sebagai tempat usaha.

b. Fasilitas Perkantoran dan Pelayanan Umum

Fasilitas perkantoran dan pelayanan umum yang tersebar di Kawasan Perkotaan Watampone berdasarkan hasil identifikasi lapangan berjumlah 40 unit yang tersebar pada tiap kelurahan, diantaranya pada Kelurahan Biru sebanyak 6 unit, Bukaka 1 unit, Manurunge sebanyak 22 unit yang merupakan pusat kawasan perkantoran pemerintah, di Kelurahan Masumpu sebanyak 2 unit, Kelurahan Pappolo hanya terdapat 1 unit, Kelurahan Ta' sebanyak 5 unit, Kelurahan Walannae juga hanya terdapat 1 unit, serta Kelurahan Watampone sebanyak 2 unit.

c. Fasilitas Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan fasilitas yang diperuntukkan untuk peningkatan sumberdaya manusia. Tinggi rendahnya kualitas SDM sangat ditentukan keberadaan fasilitas pendidikan dengan berbagai sistem pendidikan yang diselenggarakan. Jumlah sarana pendidikan di kawasan Perkotaan Watampone sebanyak 193 unit yang meliputi TK, SD, SLTP dan SLTA, baik yang swasta maupun negeri. Adapun jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Tanete Riattang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.13
Jumlah Fasilitas Pendidikan Menurut Jenjang Dirinci
Per Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	TK	SDN	SMP	SMA	MI	MTSn	MA
1	Tanete Riattang	33	30	4	5	2	2	1
2	Tanaete Riattang Timur	25	18	4	-	6	3	1
3	Tanete Riattang Barat	26	23	-	5	4	1	-
Jumlah		84	71	8	10	12	6	2

Sumber: Kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2016

2. Fasilitas Kesehatan

Kualitas kesehatan masyarakat suatu daerah ditentukan oleh pelayanan kesehatan yang ditandai dengan adanya sarana kesehatan. Jenis sarana kesehatan tentu saja disesuaikan dengan kualifikasi suatu daerah. Jumlah sarana kesehatan di Kawasan Perkotaan Watampone terdiri dari Rumah Sakit 4 unit, Puskesmas/Pustu 12 unit, Rumah Sakit Bersalin/BKIA 1 unit, dan Posyandu yang tersebar pada seluruh kelurahan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 70 unit. lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.14
Jumlah Sarana Kesehatan Di Rinci Per Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Rumah sakit	Puskesmas/pustu	Rs.bersalin /bkia	Posyandu
1	Tanete Riattang	2	1	1	25
2	Tanaete Riattang Timur	1	3	-	23
3	Tanete Riattang Barat	1	8	-	22
JUMLAH		4	12	1	70

Sumber: Kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2016

3. Fasilitas Ibadah

Sarana Peribadatan merupakan fasilitas yang digunakan untuk Kegiatan Rohani manusia. Jumlah sarana Peribadatan di Kawasan Perkotaan Watampone sebanyak 175 unit yang meliputi Mesjid, Mushollah/Langgar, Gereja, dan Kuil/Vihara, Adapun jumlah sarana peribadatan di Kawasan Perkotaan Watampone lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15

Jumlah Sarana Peribadatan Di Rinci Per Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Mesjid	Mushollah	Gereja	Kuil/vihara
1	Tanete Riattang	40	27	3	1
2	Tanaete Riattang Timur	40	6	-	-
3	Tanete Riattang Barat	48	7	2	1
Jumlah		128	40	5	2

Sumber: Kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2016

4. Fasilitas Olah Raga

Fasilitas Olah Raga Merupakan Fasilitas yang penting guna menjaga Kesehatan Jasmani/fisik. Di Kecamatan Tanete Riattang Memiliki beberapa jenis fasilitas olah raga yang terdiri dari Lapangan Sepak bola, Volly, dan Tennis juga Futsal yang tersebar di Kecamatan Tanete Riattang. Untuk lebih Jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.16

Jumlah Fasilitas Olah Raga Di Rinci Per DeKecamatan, Tahun 2015

No	Kecamatan	Sepak Bola	Volly Ball	Tennis	Futsal
1	Tanete Riattang	3	6	3	3
2	Tanaete Riattang Timur	-	-	-	-
3	Tanete Riattang Barat	1	-	-	-
Jumlah		4	6	3	3

Sumber: Kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2016

C. Kawasan Perkotaan Palattae

1. Kedudukan Kawasan Perkotaan Palattae Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone

Selain fungsi Kawasan Perkotaan Watampone sebagai PKW, sistem perkotaan di Kabupaten Bone juga terdapat beberapa fungsi kawasan perkotaan dalam hirarki yang lebih rendah yaitu PKLp, PPK dan PPL.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL), pada dasarnya ditetapkan secara nasional dan regional (RTRWN dan RTRWP Sulsel). Namun demikian terdapat kawasan perkotaan yang secara fungsional dan sistem pelayanan yang ada, dapat diarahkan sebagai PKL, sehingga dalam RTRW ini ditetapkan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp).

Kawasan perkotaan yang dimaksud, adalah Kota Palattae di Kecamatan Kahu, memiliki fungsi pelayanan terhadap beberapa kawasan disekitarnya, sehingga diarahkan sebagai PKLp. Peran dan fungsi PKLp Palattae, antara lain:

- Perdagangan antar kawasan
- Transportasi antar kawasan

- Jasa kepariwisataan
- Permukiman
- Hasil pertanian perkebunan dan perikanan



2. Aspek Kependudukan

Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kawasan perkotaan Palattae tercatat 38.574 jiwa. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, maka selama kurun waktu 1 tahun, Maka pertumbuhan penduduk Kecamatan Kahu sekitar 0,53 persen. Ditinjau dari komposisi penduduk, penduduk Kecamatan Kahu terdiri atas 18.522 laki-laki dan 20.052 perempuan. Dengan demikian, perbandingan jenis kelamin (sex ratio) di kecamatan ini adalah 92,17 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 92 penduduk laki-laki.

3. Aspek Sarana Prasarana Kawasan Perkotaan Palattae

a. Fasilitas Pendidikan

Salah satu tolak ukur pembangunan dibidang Pendidikan dari sisi supply adalah keberadaan sarana dan prasarana Pendidikan. Pada tahun 2015, di Kawasan perkotaan Palattae terdapat 43 unit sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), 28 unit Sekolah Dasar (SD) dan 9 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 4 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), 5 unit Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 3 unit Sekolah Menengah Atas (SMU).

b. Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan di Kawasan Perkotaan Palattae meliputi, 6 Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu), 50 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu tersebut telah tersebar diseluruh desa. Namun,

sejauh ini belum tersedia fasilitas Poskesdes, Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin ataupun Balai Kesehatan Ibu dan Anak.

c. Fasilitas Perkantoran

Pada Kawasan perkotaan Palattae terdapat 16 instansi pemerintah/BUMN yang terdiri atas instansi pelaksana pemerintahan (Kantor Camat), Pelayanan Kesehatan (Puskesmas), dan lain-lain. Seluruh instansi menyerap 356 pegawai dengan pegawai terbanyak terdapat pada Puskesmas (91 pegawai) dan yang paling sedikit adalah BPS yaitu 1 pegawai. Banyaknya pegawai Kandep Dikbudcam tidak termasuk guru, begitu pula untuk Puskesmas tidak termasuk dokternya. Secara administratif, Kawasan Perkotaan Palattae terdiri atas 20 desa/kelurahan. Keseluruhan desa/kelurahan tersebut telah memiliki kelembagaan desa untuk menunjang kehidupan bermasyarakat seperti LKMD dan Kepemudaan.

4. Aspek Pertanian

Pada tahun 2015 produksi komoditi padi mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 92.699 ton, naik 15.083 ton dari tahun 2014. Sedangkan komoditi kacang kedele mengalami peningkatan yang cukup tajam sekitar 215 persen dari tahun sebelumnya. Produksi sayuran di Kecamatan Kahu pada tahun 2015 jikadibandingkan dengan tahun sebelumnya secara keseluruhan hampir seimbang karena ada yang mengalami peningkatan ada juga yang produksinya turun. Pada sub sektor perkebunan, produktivitas tanaman

perkebunan utamanya coklat produksinya turun drastis yaitu 47,13 persen. Dari sub sektor peternakan pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 pada beberapa jenis ternak tidak mengalami perubahan jumlah yang signifikan, kecuali Sapi yang bertambah 1.239 ekor. Lain halnya dengan kelompok unggas, ayam buras mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 97.669 ekor pada tahun 2014 menjadi 119.957 ekor pada tahun 2015. Unggas, ayam buras mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 97.669 ekor pada tahun 2014 menjadi 119.957 ekor pada tahun 2015.

D. Gambaran Umum Kawasan Perkotaan Balangnipa Kabupaten Sinjai

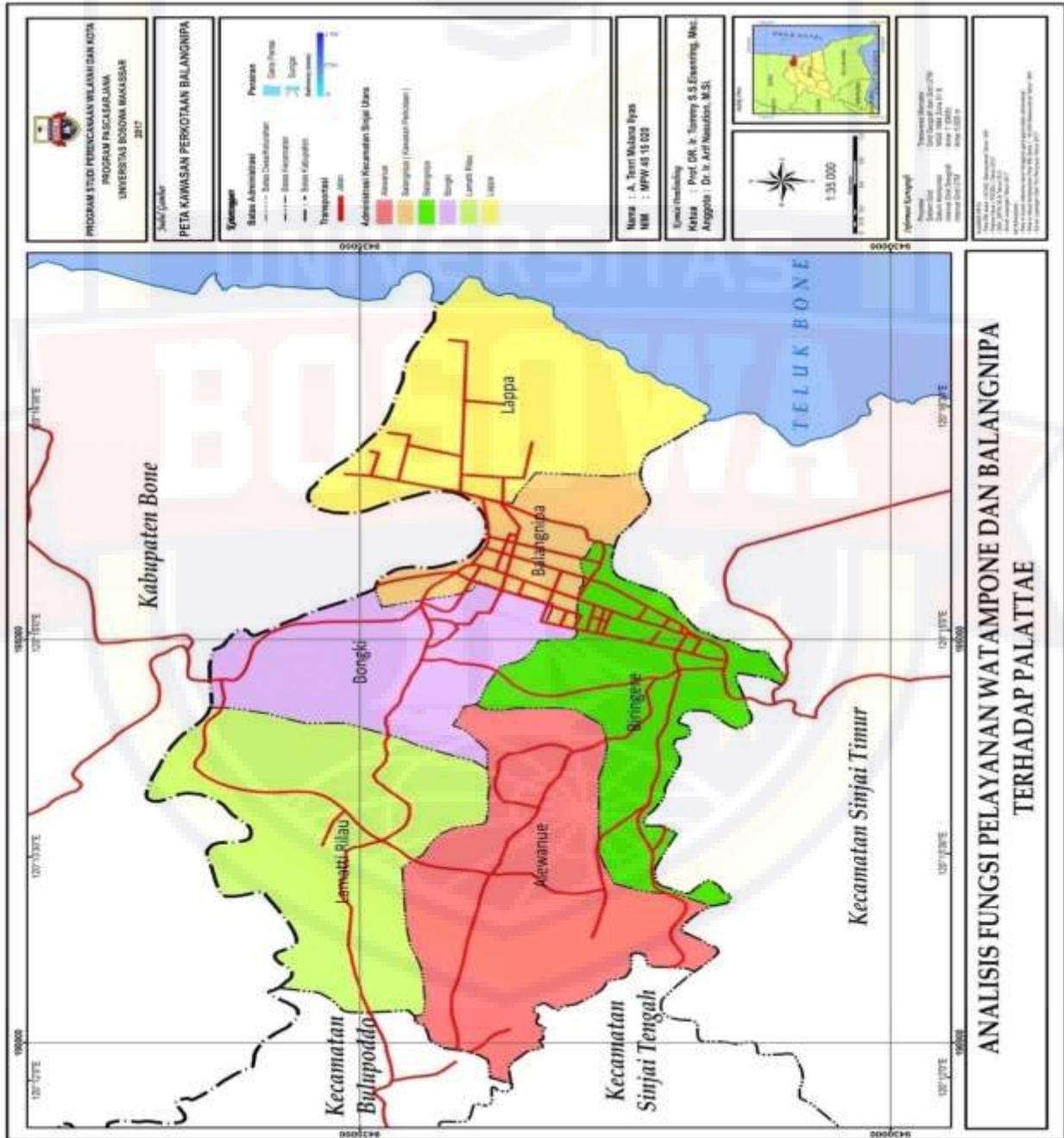
1. Geografis Wilayah

Secara Administrasi Kawasan Perkotaan Balangnipa Berada pada wilayah administrasi Kecamatan Sinjai Utara yang terletak di sebelah Utara Kabupaten Bone dengan batas-batas wilayah

- sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bulupoddo,
- sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone,
- sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Timur dan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinjai Tengah.

Kecamatan Sinjai Utara terdiri dari 6 Kelurahan, Wilayah terluas adalah Kelurahan Lappa dengan luas 11,58 Km² Sedangkan wilayah yang paling

kecil adalah Kelurahan Balangnipa yang juga merupakan pusat kota Kabupaten Sinjai dengan luas wilayah 2,17 Km².



2. Aspek Kependudukan

Kawasan Perkotaan Balangnipa memiliki jumlah penduduk 46.166 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.561 jiwa/km². Secara Administrasi Kelurahan Balangnipa salah satu kelurahan yang ada pada Kawasan perkotaan Balangnipa merupakan Kelurahan yang paling padat penduduknya sebanyak 11.359 jiwa. Perpindahan penduduk yang datang ke Kawasan Perkotaan Balangnipa lebih besar dari yang keluar yaitu 2.016 orang datang dan 1.576 orang pindah. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Penduduk laki-laki yang pergi 811 orang dan penduduk yang datang yaitu 1.127 orang. Sedangkan penduduk perempuan yang pergi 765 orang dan penduduk yang datang yaitu 889 orang.

3. Aspek Sarana Wilayah

1. Sarana Pendidikan

Kawasan Perkotaan Balangnipa sudah memiliki fasilitas yang cukup, dimana terdapat 34 SD/MIN/MIS, 11 SMP/MTsN/MTs, dan 11 SMA/SMKN/SMK S/MAN/MAS. Jumlah guru SD/MI adalah 623. Dengan ketersediaan guru tersebut, perbandingan guru dengan murid adalah 1:10. Jumlah guru SMP/MTs adalah 364, sehingga perbandingan antara guru dengan murid di SMP/MTs adalah 1:9. Adapun jumlah guru SMA/MA adalah 357 orang, sehingga perbandingan antara guru dengan murid di SMA adalah 1:11 Dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2015, jumlah guru ini memiliki tren meningkat.

2. Sarana Kesehatan dan Olahraga

Fasilitas kesehatan di Kawasan Perkotaan Balangnipa terdiri dari 1 unit Rumah Sakit, 5 unit Puskesmas/pustu dan 1 poskesdes. Untuk memenuhi kebutuhan akan perawatan kesehatan bagi masyarakat Khususnya di Wilayah Sinjai Utara (Kawasan Perkotaan Balangnipa) maka pemerintah mengalokasikan 5 dokter umum, 8 dokter spesialis, 3 dokter gigi, 27 orang perawat kesehatan dan 11 bidan yang tersebar hampir di seluruh kelurahan di Kecamatan Sinjai Utara (Kawasan Perkotaan Balangnipa).

Selain fasilitas kesehatan, untuk menunjang kebugaran fisik penduduk Kawasan Perkotaan Balangnipa, tersedia beberapa fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga yang tersedia antara lain lapangan sepak bola, bola volly, bulu tangkis, tenis lapangan dan tenis meja. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap olahraga cukup baik.

3. Sarana Perdagangan dan Industri Pengolahan

Perdagangan merupakan kegiatan yang sangat vital dalam perekonomian, dimana barang-barang yang dihasilkan oleh produsen sampai ketangan masyarakat yang membutuhkannya melalui perdagangan. Perdagangan ini dapat dilakukan di mana saja, namun ada tempat-tempat yang menjadi pusat perdagangan seperti pasar, toko ataupun tempat lelang. Ada 4 unit pasar umum tempat masyarakat melakukan transaksi jual beli. Berdasarkan Administrasi wilayah, Keempat pasar itu antara lain terdapat di Kelurahan Biringere, Kelurahan Bongki, Kelurahan Balangnipa dan Kelurahan

Lappa. Di pasar sentral sinjai adalah pasar yang paling ramai dikunjungi pembeli dan penjual yang letaknya berada ditengah-tengah kota sinjai di pasar ini banyak diperdagangkan berbagai barang kebutuhan pokok ataupun lainnya. Harga kebutuhan makanan sehari-hari relatif terjangkau meskipun sebagian besar merupakan produksi dari luar kecamatan seperti beras, buah- buahan dan sayur-sayuran.

Di Kawasan Perkotaan Balangnipa terdapat 63 usaha/perusahaan industri yang semuanya merupakan industri rumah tangga. Industri rumah tangga terbanyak terdapat di Biringere, yaitu 18 atau hamper 38,29 persen dari total industri rumah tangga di Sinjai Utara. Kelurahan Balangnipa yang merupakan ibukota kecamatan terdapat industri rumah tangga 16unit usaha. Pada tahun 2015 terjadi penambahan jumlah industri rumah tangga, dari 23 industri pada tahun sebelumnya menjadi 47 industri. Banyaknya tenaga kerja yang terserap pun meningkat seiring meningkatnya usaha industri. Menurut skala industri, tenaga kerja yang berhasil diserap dari industri rumah tangga berjumlah 98 orang. Karena banyaknya industri rumah tangga di Kelurahan Biringere, maka banyak pula tenaga kerja industri rumah tangga di daerah ini, yaitu 45 orang atau sekitar 45,91 persen. Demikian juga dengan Kelurahan Balangnipa yang mempunyai industri rumah tangga dan tenaga kerja.

E. Karakteristik Responden

1. Tingkat Usia

Dari hasil kuisioner tingkat usia responden di dominasi oleh responden yang berusia antara 35-44 tahun yaitu sebanyak 47 responden, disusul responden yang berusia 25-34 tahun yaitu sebanyak 34 responden, responden yang berusia > 45 tahun sebanyak 8 responden dan sisanya 6 responden berusia 15-24 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawa ini:

Tabel 4.17
Tingkat Usia Responden

No	Tingkat Usia	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	15-24	6	6,32
2	25-34	34	35,79
3	35-44	47	49,47
4	>45	8	8,42
Jumlah		95	100

Sumber : Hasil Survey Lapangan Tahun 2018

2. Tingkat Pendidikan

Dari hasil kuisioner, tingkat pendidikan responden didominasi oleh tamatan pendidikan tinggi yaitu sebanyak 46 responden, tamatan SMA sebanyak 35 responden tamatan SLTP sebanyak 14 responden sedangkan Tamatan SD tidak ditemukan pada responden dilokasi penelitian . Untuk lebih jelas lihat table berikut:

Tabel 4.18
Tingkat Pendidikan Responden

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	Tamatan SD	0	0,00
2	Tamatan SLTP	14	14,74
3	Tamatan SMA	35	36,84
4	Tamatan Pendidikan Tinggi	46	48,42
Jumlah		95	100

Sumber : Hasil Survey Lapangan Tahun 2018

3. Mata Pencaharian Responden

Dari hasil kuisioner, mata pencaharian responden sebanyak 34 responden bermata pencaharian sebagai pegawai negeri, 27 responden bermata pencaharian sebagai petani, 25 responden bermata pencaharian sebagai pedagang dan 9 responden bermata pencaharian sebagai pegawai swasta .

Untuk lebih jelas lihat table berikut:

Tabel 4.19
Mata Pencaharian Responden

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	Pegawai Negeri	34	35,79
2	Pegawai Swasata	9	9,47
3	Petani	27	28,42
4	Pedagang	25	26,32
Jumlah		95	100,00

Sumber : Hasil Survey Lapangan Tahun 2018

F. Analisis Pengaruh Fungsi Pelayanan Watampone Terhadap Palattae Dan Balangnipa Terhadap Palattae.

1. Analisis Skala Gutman

Untuk mengetahui pengaruh Fungsi Pelayanan Watampone Dan Balangnipa Terhadap Palattae peneliti menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dengan metode analisis skala gutman. Adapun variable yang digunakan dalam penelitian ini dan yang akan di analisis yaitu terdiri atas 3 unsur (Keterkaitan fisik, keterkaitan ekonomi, dan keterkaitan social). Ketiga keterkaitan unsur ini diambil berdasarkan kajian teori teori Rondinelli. Dari tiga unsur tersebut maka variable yang diangkat dalam penelitian ini yaitu sebanyak 6 variabel (Aspek Transportasi; pola pemanfaatan ruang, aktifitas ekonomi, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas kesehatan). Untuk menganalisis 6 variabel tersebut maka indicator yang digunakan untuk mengukur dan menganalisa pengaruh fungsi pelayanan Watampone Dan Balangnipa terhadap Palattae yaitu sebanyak 14 indikator yang dibuat dalam bentuk pernyataan yang dibagikan pada sampel penelitian.

Tabel 4.20.

Hasil Tabulasi Data Kuisisioner

No	Unsur Keterkaitan Wilayah	Variabel Penelitian	No	Pernyataan (Indikator)	Jawaban	
					Setuju	Tidak Setuju
1	Keterkaitan Fisik	Aspek Transportasi	1	Kondisi prasarana jalan yang ada dipalattae sudah cukup baik	92	3
			2	Sarana Transportasi dari dan menuju Palattae sudah cukup memadai	95	0
			3	Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mengakses Palattae dan sekitarnya semakin efisien	95	0
Total Jawaban Aspek Transportasi					282	3

		Pemanfaatan Lahan	4	Areal persawahan dan perkebunan masih lebih mendominasi daripada areal permukiman	95	0
2	Keterkaitan Ekonomi	Aktifitas Ekonomi	1	Keberadaan pasar rakyat Balle cukup membantu bagi masyarakat di Palattae dan sekitarnya	69	26
			2	Pasar rakyat Balle juga menguntungkan bagi pedagang lokal maupun non lokal	95	0
			3	Padi, Kelapa dan kopi adalah beberapa hasil bumi yang dipasarkan ke watampone disamping hasil peternakan seperti sapi dan ayam buras.	73	22
			4	Mata pencaharian sebagian besar penduduk palattae adalah petani dan pedagang.	95	0
			5	Ketersediaan infrastruktur wilayah seperti toko bahan campuran, warung-warung makan, tempat penginapan, serta sarana hiburan di Palattae masih kurang	95	0
			6	Pedagang ikan yang ada di Palattae memperoleh ikan untuk diperdagangkan dari TPI Lappa yang ada di Kabupaten Sinjai demikian pula sebaliknya nelayan yang ingin menjual dagangannya lebih memilih ke sinjai	77	18
			Total Jawaban Aspek Ekonomi			
3	Keterkaitan Fasilitas Sosial	Fasilitas Kesehatan	1	Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sifatnya mendesak, masyarakat lebih memilih ke Balangnipa.	63	32
			2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Ada Di Watampone Lebih Lengkap	87	8
		Fasilitas Pendidikan	3	Perguruan tinggi yang ada di Watampone cukup digemari oleh masyarakat Palattae	57	38

			4	Untuk pendidikan sekolah menengah ke bawah, sudah tersedia di Palattae dalam jumlah yang cukup sehingga tidak perlu ke luar Palattae.	95	0
				Total Jawaban Aspek Keterkaitan Fasilitas Sosial	302	78

Sumber: Hasil Olahan data 2018.

a. Analisis Unsur Keterkaitan Fisik

1) Aspek Transportasi

Untuk mengetahui posisi persentase jawaban “Setuju” dari variabel aspek transportasi yang diperoleh dari angket maka dihitung terlebih dahulu kemudian ditempatkan pada rentang skala persentase sebagai berikut:

- Nilai Jawaban “setuju” pada variabel aspek transportasi, adalah 1
- Nilai Jawaban Tidak Setuju pada variable aspek transportasi adalah 0
- Di konversikan dalam persentase;

Jawaban “setuju” : $1 \times 100\% = 100\%$

Jawaban “tidak setuju” $0 \times 100\% = 0\%$ (sehingga tidak perlu dihitung)

- Perhitungan jawaban “setuju” dari angket diatas yaitu;

Jawaban “setuju” = $94/95 \times 100\% = 98,95\%$.

Dari analisis skala gutman titik kesesuaian 98,95%, sehingga dapat dikatakan bahwa aspek transportasi sangat pengaruh terhadap konektifitas Kota Palattae dengan wilayah sekitarnya.

2) Pemanfaatan Lahan

Untuk mengetahui posisi persentase jawaban “Setuju” dari variabel Penggunaan lahan yang diperoleh dari angket maka dihitung terlebih dahulu kemudian ditempatkan pada rentang skala persentase sebagai berikut:

- Nilai Jawaban “setuju” pada variable penggunaan lahan adalah 1
- Nilai Jawaban Tidak Setuju pada variable Waktu Tempuh adalah 0
- Di konversikan dalam persentase;

$$\text{Jawaban “setuju”} : 1 \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Jawaban “tidak setuju”} : 0 \times 100\% = 0\% \text{ (sehingga tidak perlu dihitung)}$$

- Perhitungan jawaban “setuju” dari angket diatas yaitu;

$$\text{Jawaban “setuju”} = 95/95 \times 100\% = 100\%.$$

Dari analisis skala gutman titik kesesuaian 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa aspek pemanfaatan lahan Areal persawahan dan perkebunan masih lebih mendominasi daripada areal permukiman

b. Unsur Keterkaitan Ekonomi

Untuk mengetahui posisi persentase jawaban “Setuju” pada unsur keterkaitan ekonomi yang diperoleh dari angket maka dihitung terlebih

dahulu kemudian ditempatkan pada rentang skala persentase sebagai berikut:

- Nilai Jawaban “setuju” pada variable aspek aktifitas ekonomi adalah 1
- Nilai Jawaban Tidak Setuju pada variable aspek aktifitas ekonomi adalah 0
- Di konversikan dalam persentase;
Jawaban “setuju” : $1 \times 100\% = 100\%$
Jawaban “tidak setuju” $0 \times 100\% = 0\%$ (sehingga tidak perlu dihitung)
- Perhitungan jawaban “setuju” dari angket diatas yaitu;
Jawaban “setuju” rata rata = $84/95 \times 100\% = 88,42\%$.

Dari analisis skala gutman titik kesesuaian 88,42%, sehingga dapat dikatakan bahwa dari aspek keterkaitan ekonomi Kota Palattae memiliki keterkaitan dengan wilayah sekitarnya.

c. **Unsur Keterkaitan Fasilitas Sosial**

Untuk mengetahui posisi persentase jawaban “Setuju” pada unsur keterkaitan fasilitas sosial yang diperoleh dari angket maka dihitung terlebih dahulu kemudian ditempatkan pada rentang skala persentase sebagai berikut:

- Nilai Jawaban “setuju” pada variable aspek fasilitas sosial adalah 1
- Nilai Jawaban Tidak Setuju pada variable aspek fasilitas sosial adalah 0
- Di konversikan dalam persentase;

Jawaban “setuju” : $1 \times 100\% = 100\%$

Jawaban “tidak setuju” $0 \times 100\% = 0\%$ (sehingga tidak perlu dihitung)

- Perhitungan jawaban “setuju” dari angket diatas yaitu;

Jawaban “setuju” rata rata = $75,5/95 \times 100\% = 79,47\%$.

Dari analisis skala gutman titik kesesuaian 79,47%, sehingga dapat dikatakan bahwa dari aspek keterkaitan fasilitas sosial Kota Palattae memiliki keterkaitan dengan wilayah sekitarnya.

2. Interpretasi Hasil Analisis Skala Gutman

a. Aspek Fisik

- 1) Dari pernyataan no. 1 “Kondisi prasarana jalan yang ada di Palattae sudah cukup baik”. Dari pernyataan ini diperoleh jawaban “setuju” sebanyak 92 responden dari total 95 responden, hal ini terbukti dari 7 ruas jalan dengan total 142,63 Km panjang jalan yang melalui Kota Palattae, sekitar ± 100 Km telah terbangun, dan sisanya masih dalam proses pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap. Adapun responden yang memberi jawaban “tidak setuju” dengan alasan bahwa pembangunan jalan yang dilakukan belum menjangkau daerah tempat tinggalnya meskipun pada dasarnya bila dilihat secara teknis, kategori jalan yang dimaksud dapat dikatakan dalam kondisi sedang sehingga belum menjadi prioritas bila dibandingkan ruas-ruas jalan yang lain.

- 2) Dari pernyataan no.2 “Sarana Transportasi dari dan menuju Palattae sudah cukup memadai” pernyataan ini diperoleh jawaban responden yang bulat menyatakan “setuju”. Hal ini menggambarkan bahwa arus transportasi masyarakat dari dan menuju Palattae sudah cukup lancar, terbukti dengan tersedianya angkutan trayek Palattae-Watampone, Palattae-Sinjai, Palattae-Makassar, serta trayek Palattae menuju desa-desa di wilayah sekitarnya dengan jadwal tertentu pula.
- 3) Dari pernyataan no.3 “Waktu tempuh yang digunakan untuk mengakses Palattae dan sekitarnya semakin efisien” pernyataan ini diperoleh jawaban responden yang bulat menyatakan “setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa semua responden meyakini dengan meningkatnya kondisi jalan maka perjalanan akan semakin singkat, berdasarkan survey lapangan bahwa waktu tempuh Watampone – Palattae sebelum peningkatan kondisi ruas jalan (bila melalui ruas Balange-Masago) adalah 150 – 180 menit namun setelah dilakukan peningkatan jalan, waktu tempuh bisa menjadi sekitar 90 - 120 menit dengan kecepatan rata-rata 60 – 70 km/jam.
- 4) Dari pernyataan no.4 “Areal persawahan dan perkebunan masih lebih mendominasi daripada areal permukiman” pernyataan ini diperoleh jawaban responden yang bulat menyatakan “setuju”. Hal ini dapat dilihat bahwa areal permukiman yang luas hanya terdapat di Palattae sebagai ibukota kecamatan dengan kepadatan penduduk sekitar 533

org/km² merupakan yang terpadat di Kecamatan Kahu, sedangkan di daerah pedesaan, persawahan dan perkebunan masih lebih mendominasi, hal ini terbukti dengan banyaknya komoditi pertanian dan perkebunan yang dihasilkan. Selain itu berdasarkan peta tutupan lahan menurut RTRW Kabupaten Bone, Kecamatan Kahu didominasi oleh sawah dan pertanian lahan kering campur masing-masing lahan sawah sebesar 38,52 % dan Lahan kering sebesar 61,48%.

Dari hasil analisis diatas dapat diinterpretasikan bahwa, pada aspek fisik, ketersediaan prasarana jalan yang merupakan akses penghubung antara Kota Pallatae dan wilayah sekitarnya termasuk Kota Watampone dan Balangnipa memiliki peran penting dalam proses konektifitas Kota Palattae yang secara hirarki tata ruang berkedudukan sebagai PKLp dalam arahan Struktur ruang RTRW Kabupaten Bone yang memiliki peran dan fungsi sebagai, perdagangan antar kawasan, transportasi antar kawasan, jasa kepariwisataan, Permukiman serta hasil pertanian perkebunan dan perikanan dalam memanfaatkan fungsi pelayanan Kota Watampone yang berkedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang memiliki peran dan fungsi yang diberikan sesuai dengan potensi dan kemampuan wilayah, yang meliputi, Sistem transportasi regional terpadu (darat, laut dan udara), Pusat pelayanan Pemerintahan dan Pendidikan, Pelayanan Jasa sosial dan ekonomi, Pusat pelayanan Jasa kepariwisataan, Pusat Permukiman, Pusat pelayanan umumserta Pusat kegiatan

Agroindustri dan agrobisnis. Dukungan Aspek Prasarana jalan juga memberikan peluang konektivitas Kota Palattae dalam proses interaksi keruangan dengan Kota Balangnipa yang berkedudukan sebagai Pusat Kegiatan Lokal dalam struktur ruang Kabupaten Sinjai dengan pertimbangan jarak yang lebih dekat yaitu 90 - 120 menit dengan kecepatan rata-rata 60 – 70 km/jam. Selain prasarana jalan serta waktu tempuh, ketersediaan moda angkutan dalam hal ini angkutan umum juga memiliki peran penting dalam mendukung interaksi keruang yang terjadi pada Kota Palattae dan Kota Watampone Maupun Kota Palattae dan Kota Balangnipa serta wilayah di sekitarnya. tersedianya angkutan trayek Palattae-Watampone, Palattae-Sinjai, Palattae-Makassar, serta trayek Palattae menuju desa-desa di wilayah sekitarnya menjadi salah satu factor dalam mendukung pengembangan Kota Palalttae dari sisi konektivitas wilayah baik skala regional Kabupaten Bone Maupun skala Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu ketersediaan areal persawahan dan perkebunan masih lebih mendominasi daripada areal permukiman hal ini memberikan peluang Pengembangan Kota Pallatae sebagai fungsi kawasan pertanian dan juga permukiman.

b. Aspek Ekonomi

- 1) Dari pernyataan no. 1 “Keberadaan pasar rakyat Balle cukup membantu bagi masyarakat di Palattae dan sekitarnya” pernyataan ini

diperoleh jawaban “setuju” sebanyak 69 responden dari total 95 responden, dengan alasan bahwa kehadiran pasar rakyat Balle dengan frekuensi 3 kali dalam seminggu yaitu minggu, rabu dan jumat sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan. Responden ini pada umumnya berasal dari kalangan mahasiswa, PNS dan masyarakat umum, Sedangkan 26 responden yang memberi jawaban “tidak setuju” dalam artian belum cukup untuk memenuhi kebutuhan, responden ini pada umumnya melakukan kegiatan perdagangan dengan alasan bahwa adanya selang waktu antara minggu, rabu dan jumat berarti tidak ada penghasilan selama jeda tersebut ditambah lagi bagi pedagang ikan dan sayur-mayur dapat membuat barang dagangannya yang tidak laku terjual tidak layak lagi untuk dijual di hari pasar berikutnya sehingga frekuensi 3 kali dalam seminggu dianggap masih kurang.

- 2) Dari pernyataan no. 2 “Pasar rakyat Balle juga menguntungkan bagi pedagang lokal maupun non local” pernyataan ini diperoleh jawaban “setuju” sebanyak 95 responden dari total 95 responden, ini berarti seluruh responden menyetujui bahwa keberadaan pasar rakyat Balle menguntungkan berbagai pihak, berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui bahwa bukan hanya pedagang local, tapi ada juga non local yang ikut berpartisipasi ketika hari pasar tiba, entah itu dari luar Palattae atau bahkan lintas kecamatan.

3) Dari pernyataan no. 3 “Padi, Kelapa dan kopi adalah beberapa hasil bumi yang dipasarkan ke watampone disamping hasil peternakan seperti sapi dan ayam kampung”.Pernyataan ini diperoleh jawaban sebanyak 73 responden menjawab “setuju” dengan alasan bahwa dengan memasarkan ke watampone lebih besar peluang untuk memperoleh keuntungan karena pasar yang lebih luas. Sedangkan sebanyak 22 responden menjawab “tidak setuju” karena mereka memasarkan dagangannya ke Balangnipa atau di Palattae sendiri khususnya bagi pedagang musiman dengan pertimbangan biaya sehingga pilihan pasarnya adalah yang paling dekat dari Palattae sebagai sumber produksi. Sebagai gambaran produksi padi pertahun rata-rata 62.629,33 ton, kakao sebanyak 1.291,33 ton, kelapa sebanyak 697,269 ton sedangkan untuk hewan ternak misalnya sapi produksi rata-rata 27.443 ekor/tahun, ayam kampung sebanyak 112.542 ekor/tahun, dan itik sebanyak 14.237 ekor pertahun. Menurut data Kabupaten Bone Dalam Angka 2017 Kec. Kahu adalah salah satu dari 4 wilayah sentra/basis produksi tanaman pangan terbesar di Kab. Bone.

4) Dari pernyataan no. 4 “Mata pencaharian sebagian besar penduduk palattae adalah petani dan pedagang”. Pernyataan ini diperoleh jawaban sebanyak 95 responden sependapat dengan pernyataan bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Palattae adalah petani dan

pedagang. Dengan alasan bahwa areal pertanian dan perkebunan masih cukup banyak sehingga untuk memperoleh penghasilan dari sektor ini cukup bisa diperhitungkan, apalagi dengan dibangunnya pasar rakyat Balle sehingga peluang pemasaran juga lebih baik. Khususnya bagi para pedagang musiman. Namun tidak jarang beberapa pedagang menjadikan profesi petani sebagai pekerjaan sampingan karena profesi sesungguhnya adalah pegawai pemerintah (guru/PNS). Menurut data Kabupaten Bone Dalam Angka tahun 2017, jumlah petani yang ada di Kec. Kahu adalah 68.680 orang adalah terbesar ke 4 se-Kab. Bone.

- 5) Berdasarkan pernyataan no. 5 “Ketersediaan infrastruktur wilayah seperti toko bahan campuran, warung-warung makan, tempat penginapan, serta sarana hiburan di Palattae masih kurang”, dari pernyataan ini seluruh responden menyatakan persetujuannya bahwa infrastruktur pendukung perekonomian seperti toko bahan campuran, warung-warung makan, tempat penginapan, dll tersebut memang dirasa masih sangat kurang karena berkaca di pasar rakyat Balle sendiri, masih banyak lods-lods yang tersedia namun belum digunakan oleh pedagang secara maksimal karena hanya dibuka ketika hari pasar, saat jeda para pedagang tersebut memilih untuk menjajakan dagangannya ke luar kota, contohnya ke pasar-pasar yang ada di Kabupaten Sinjai hingga Kecamatan Libureng (Camming), Kabupaten Bone.

6) Dari pernyataan No. 6, “Pedagang ikan yang ada di Palattae memperoleh ikan untuk diperdagangkan dari TPI Lappa yang ada di Kabupaten Sinjai demikian pula sebaliknya nelayan yang ingin menjual dagangannya lebih memilih ke sinjai” dari pernyataan ini sebanyak 77 responden menjawab “setuju” dengan alasan bahwa jenis ikan yang ada di TPI Lappa lebih beragam dan biaya angkut yang dikeluarkan relative lebih murah karena jarak yang lebih dekat dari Palattae, disamping itu system perdagangan di TPI Lappa lebih dinamis bagi pedagang-pedagang kecil berbeda dengan di TPI Lonrae yang ada di Watampone, dimana system perdagangan di sana bersifat tertutup sehingga alur jual beli ikan hanya terbatas pada pihak tertentu saja, dengan kata lain ikan yang diperoleh dari nelayan akan langsung didistribusikan ke pedagang tertentu tanpa melalui pelelangan. Selanjutnya 18 responden menyatakan “tidak setuju” karena sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa ke 18 responden tersebut sudah memiliki akses di TPI Lonrae yang ada di Watampone sehingga sumber ikannya tidak hanya dari Sinjai tapi juga dari Watampone.

Dari hasil analisis diatas dapat diinterpretasikan bahwa, aktifitas ekonomi mempengaruhi proses interaksi keruangan Kawasan Perkotaan Palattae dengan Kawasan Perkotaan Balangnipa Maupun dengan Kawasan Perkotaan Watampone. Hal ini di dukung oleh temuan peneliti pada lokasi penelitian bahwa, Meskipun keberadaan Pasar Balle di Kota Palattae yang

beroperasi 3 kali dalam seminggu cukup membantu aktifitas jual beli masyarakat serta menguntungkan bagi para pedagang baik local maupun non lokal yang datang dari luar Kota Palattae, namun disisi lain Kota Pallatae juga memiliki potensi pertanian dan peternakan sebagai penghasil komoditi tanaman padi, kopi dan kelapa serta hasil pertanian lainnya, selain komoditi pertanian di sector peternakan Kota Pallatae juga merupakan penghasil ternak unggulan berupa sapi dan ayam buras. selain memasarkan hasil pertanian dan peternakan di Kota Pallatae dominan hasil pertanian dan peternakan didistribusikan ke Kota Watampone dan sebagian didistribusikan ke Kota Balangnipa. Pada sector perikanan, pedagang ikan yang ada di Palattae memperoleh ikan untuk diperdagangkan dominan berasal dari TPI Lappa yang ada di Kabupaten Sinjai, dan ada sebagian kecil juga yang memperoleh dari TPI Lonrae Kota Watampone. Aliran distribusi hasil pertanian dan peternakan dari Kota Palattae kewilayah pasar yang berada di Watampone dan Balangnipa serta aliran distribusi hasil perikanan yang masuk kewilayah pasar di Kota Palattae dipandang sebagai indikasi proses interaksi keruangan pada aspek ekonomi. Selain itu, ketersediaan sarana perdagangan seperti toko bahan campuran, warung-warung makan, tempat penginapan, serta sarana hiburan di Palattae masih sangat minim dalam menunjang aktifitas ekonomi perdagangan jasa masyarakat Palattae sehingga tidak jarang masyarakat Palattae dalam

memenuhi aktifitas perdagangan jasa, masyarakat Kota Palattae masih mengarah ke Kabupaten Sinjai hingga Kecamatan Libureng (camming).

c. Aspek Sosial

- 1) Untuk pernyataan no.1, sebanyak 63 responden menyetujui dengan alasan bahwa jarak yang relative lebih dekat untuk memperoleh perawatan yang sifatnya mendesak. Responden ini pada umumnya berdomisili di kota Palattae, Sedangkan 32 responden yang menjawab “tidak setuju” pada umumnya berdomisili di desa-desa sekitar Palattae sehingga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mendesak, pilihan pertama adalah puskesmas yang ada di kota Palattae itu sendiri.
- 2) Untuk pernyataan No. 2, diperoleh jawaban “setuju” sebanyak 87 responden, hal ini dapat dibuktikan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan berupa 4 Rumah Sakit dan sekian banyak puskesmas ditambah lagi klinik-klinik yang tersebar di Kota Watampone. Sedangkan 8 responden menjawab “tidak setuju” dengan alasan karena selama ini, mereka hanya berobat ke Sinjai sehingga tidak tahu mengenai fasilitas yang ada di Watampone.
- 3) Dari pernyataan no. 3 diperoleh jawaban “setuju” dari 57 responden dengan alasan bahwa keluarga atau sahabat atau kenalan mereka pada umumnya kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Watampone, sedangkan sebanyak 38 responden memilih jawaban “tidak setuju” karena jawaban yang serupa bahwa keluarga, sahabat atau kenalan lebih memilih

untuk kuliah ke Makassar dengan pertimbangan bahwa dengan jarak yang hampir sama antara ke Watampone dan ke Makassar, maka pilihannya adalah lebih baik ke Makassar dengan opsi perguruan tinggi yang lebih beragam.

- 4) Untuk pernyataan no. 4, semua responden menyatakan persetujuannya dengan alasan bahwa untuk jenjang pendidikan sekolah menengah ke bawah sudah cukup untuk bersekolah di wilayah Palattae saja, hal ini dikarenakan tersedianya fasilitas pendidikan di Palattae (Kecamatan Kahu) yang dianggap cukup memadai dengan jumlah SMA sebanyak 3 unit, SMP/ sederajat 9 unit, SD/MI sebanyak 37 unit dan 43 unit Taman Kanak-Kanak. Berdasarkan Kecamatan Kahu Dalam Angka, jumlah tersebut dianggap sudah cukup memadai, misalnya saja untuk jenjang pendidikan SD dan SMP rasio guru dengan murid berkisar diangka 9-13 yang berarti rata-rata 1 orang guru mengajar sekitar 9-13 murid.

Dari hasil analisis diatas dapat diinterpretasikan bahwa, untuk memenuhi aspek pelayanan kesehatan kecenderungan masyarakat Kota Palattae selain memanfaatkan fasilitas kesehatan di Kota Pallatae sendiri, dominan masyarakat memilih untuk memenuhi aspek pelayanan kesehatan pada Kota Balangnipa, meski di satu sisi ketersediaan fasilitas kesehatan di Kota Watampone lebih memadai dari segi kualitas maupun kuantitas, factor penyebabnya yaitu jarak tempuh yang cukup jauh jika pada situasi mendesak

masyarakat Kota Palattae harus mengarah ke Kota Watampone untuk mengakses pelayanan kesehatan.

Pada sisi aspek Pendidikan, dalam memenuhi jenjang pendidikan dasar mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga SMU, masyarakat Palattae cenderung memanfaatkan keberadaan fasilitas Pendidikan yang berada pada Kota Palattae (Kecamatan Kahu) untuk memenuhi jenjang Pendidikan dasar. Di satu sisi, Kota Palattae yang masih minim Fasilitas Pendidikan tinggi menyebabkan lulusan SMU yang melanjutkan kuliah pada jenjang perguruan tinggi memiliki beberapa alternative dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi, sebagian responden dalam penelitian ini menjadikan Kota Watampone sebagai daerah tujuan untuk melanjutkan studi Pendidikan tinggi dan sebagian lainnya memilih melanjutkan studi di luar wilayah Kabupaten Bone yaitu di Kota makassar dengan alasan factor jarak tempuh yang relative sama serta beragam pilihan kampus yang menjadi tempat melanjutkan studi.

3. Pembahasan Pengaruh Fungsi Pelayanan Watampone Terhadap Palattae

Dari hasil analisis menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dengan metode skala gutman serta memperhatikan jawaban atas angket, maka hasil yang diperoleh ialah kecenderungan aktifitas masyarakat Palattae dalam memanfaatkan fungsi pelayanan kota Watampone diantaranya;

1. Dalam aspek keterkaitan fisik, pengaruh pelayanan Watampone telah dapat dirasakan oleh masyarakat Palattae khususnya dalam sektor

transportasi melalui investasi pembangunan yang dilakukan pemerintah pada ruas-ruas jalan yang ada di Palattae serta melalui ketersediaan moda transportasi antar daerah sehingga semakin memperlancar arus transportasi Watampone – Palattae. Namun demikian jarak tempuh yang lumayan jauh masih membatasi pelayanan Watampone terhadap Palattae. Watampone sebagai ibukota Kabupaten Bone berjarak 100 km dari Palattae. Hal ini sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Edward Ullman terkait 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi wilayah yang salah satunya adalah Kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang (*Spatial Transferability*), yaitu Jarak yang di tempuh, biaya angkut yang memadai, dan transportasi yang lancar, merupakan kemudahan transfer dalam ruang yang menjamin lancarnya interaksi.

2. Dalam aspek unsur keterkaitan ekonomi, Pengaruh pelayanan Watampone terbatas pada sektor tertentu saja, misalnya distribusi ikan, pemasaran hasil bumi seperti padi dan hewan ternak (meskipun dalam jumlah dan frekuensi yang jauh lebih sedikit dibanding Balangnipa), hal tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh jarak yang cukup jauh sehingga dianggap kurang efisien, sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh cristaller terkait asumsi – asumsi dalam penyusunan teorinya:

- Konsumen menanggung ongkos angkutan, maka jarak ke tempat pusat dinyatakan dalam biaya dan waktu;

- Jangkauan (range) suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu;
- Konsumen memilih tempat pusat yang paling dekat untuk mendapatkan barang dan jasa;
- Kota-kota berfungsi sebagai tempat pusat bagi wilayah disekitarnya;
- Wilayah tersebut adalah suatu dataran yang rata, mempunyai ciri-ciri ekonomis sama dan penduduknya juga tersebar secara merata.

3. Dari aspek keterkaitan fasilitas social, khususnya pada sektor Pendidikan. Dimana Watampone hanya dapat memberikan pelayanan kepada Palattae dibidang pendidikan tinggi (khususnya pendidikan keperawatan) karena untuk pendidikan dasar hingga pendidikan tingkat atas, Palattae sudah dapat melayani wilayahnya sendiri, namun demikian ketersediaan fasilitas pendidikan tinggi yang ada di Watampone tidak mendominasi masyarakat Palattae walaupun secara kwanntitas maupun kualitas, fasilitas yang ada sudah cukup memadai Namun faktor jarak masih menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam mengakses Fasilitas Pendidikan di Kawasan Perkotaan Watampone.

4. Pembahasan Pengaruh Fungsi Pelayanan Balangnipa Terhadap Palattae

Dari hasil analisis menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dengan metode skala gutman, hasil yang diperoleh ialah kecenderungan aktifitas

masyarakat Palattae dalam memanfaatkan fungsi pelayanan kota Balangnipa diantaranya;

1. Dalam aspek keterkaitan fisik, pengaruh pelayanan Kawasan Perkotaan Balangnipa dirasakan khususnya pada bidang transportasi dari Palattae menuju Balangnipa, bahwa kondisi sarana dan prasarana transportasi sudah cukup baik berkat pembangunan yang dilakukan sehingga arus barang dan jasa dari Palattae menuju Balangnipa menjadi lebih efektif dan efisien ditambah lagi jarak yang memang cukup dekat membuat masyarakat Palattae cenderung memilih ke Balangnipa untuk mendapatkan kebutuhan atas barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Edwar Ullman terkait 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi wilayah yang salah satunya adalah Kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang (*Spatial Transferability*), yaitu Jarak yang di tempuh, biaya angkut yang memadai, dan transportasi yang lancar, merupakan kemudahan transfer dalam ruang yang menjamin lancarnya interaksi.
2. Dalam aspek unsur keterkaitan ekonomi, bentuk intervensi fungsi pelayanan Balangnipa terhadap Palattae juga sangat dirasakan oleh masyarakat Palattae dimana dalam memperoleh kebutuhannya akan barang dan jasa khususnya usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, Balangnipa adalah pilihan utama, sejalan dengan

apa yang di kemukakan oleh cristaller yakni asumsi – asumsi dalam penyusunan teorinya:

- Konsumen menanggung ongkos angkutan, maka jarak ke tempat pusat dinyatakan dalam biaya dan waktu;
- Jangkauan (range) suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu;
- Konsumen memilih tempat pusat yang paling dekat untuk mendapatkan barang dan jasa;
- Kota-kota berfungsi sebagai tempat pusat bagi wilayah disekitarnya;
- Wilayah tersebut adalah suatu dataran yang rata, mempunyai ciri-ciri ekonomis sama dan penduduknya juga tersebar secara merata.

3. Dari aspek keterkaitan fasilitas social, khususnya pada sektor kesehatan, Balangnipa memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap Palattae, dimana untuk memenuhi kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan, Balangnipa menjadi pilihan pertama, dengan pertimbangan kurang efisien jika dalam keadaan kritis masyarakat Palattae harus berobat dengan jarak tempuh yang lebih jauh ke Kawasan Perkotaan Watampone.

Dengan demikian berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, diketahui bahwa Palattae menerima fungsi pelayanan dari Watampone dan Balangnipa pada aspek fisik (transportasi), ekonomi dan sosial meskipun dengan skala yang berbeda. Demikian pula peranan Palattae Terhadap Watampone dan Balangnipa. Dimana Palattae berkontribusi sebagai salah satu basis/sentra

produksi tanaman pangan dan hewan ternak (sapi dan ayam kampung) bagi Watampone dan Balangnipa. Intervensi Balangnipa terhadap fungsi pelayanan Watampone – Palattae mengakibatkan kecenderungan Palattae kepada Balangnipa lebih besar dibanding ke Watampone dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa meskipun fungsi Balangnipa sebagai PKL lebih rendah secara hierarki daripada Watampone yang merupakan PKW. Hal tersebut menunjukkan bahwa Peranan Watampone sebagai PKW terhadap Palattae tidak efektif lagi karena faktor jarak ditambah lagi intervensi Balangnipa yang pelayanannya jauh lebih efektif sebagai PKL sehingga memungkinkan bagi pengembangan daerah otonomi baru (DOB).

G. Analisis Pola Interaksi Wilayah Palattae dalam Memanfaatkan Fungsi Pelayanan Watampone dan Balangnipa

Dalam menganalisis Model Interaksi wilayah pendekatan untuk melihat atau menilai hubungan antar daerah yaitu dengan model gravitasi di perkenalkan oleh W.J. Reilly (1929). Disini, daerah dianggap suatu massa. Hubungan antar daerah dipersamakan dengan hubungan antar massa. Massa wilayah juga mempunyai daya tarik, sehingga terjadi pengaruh-mempengaruhi antar daerah sebagai perwujudan kekuatan Tarik menarik antar daerah. Untuk melihat interaksi yang terjadi antara Kawasan Perkotaan Palattae dan Kawasan Perkotaan Watampone serta Kawasan Perkotaan Palattae dan Kawasan Perkotaan Balangnipa sebagai lokasi penelitian dengan persamaan

$$I = \frac{P_1 \cdot P_2}{d^2}$$

Dimana :

- I = Interaksi di antara kedua region
- $P^1 P^2$ = Jumlah penduduk masing-masing region
- d = Jarak di antara ke dua region

Untuk mengukur besarnya interaksi antara Palattae-Watampone dan Palattae-Balangnipa maka diketahui,

Jumlah Penduduk Kota ;

- Watampone : 142.199 Jiwa
- Balangnipa : 46.166 Jiwa
- Palattae : 38.574 Jiwa

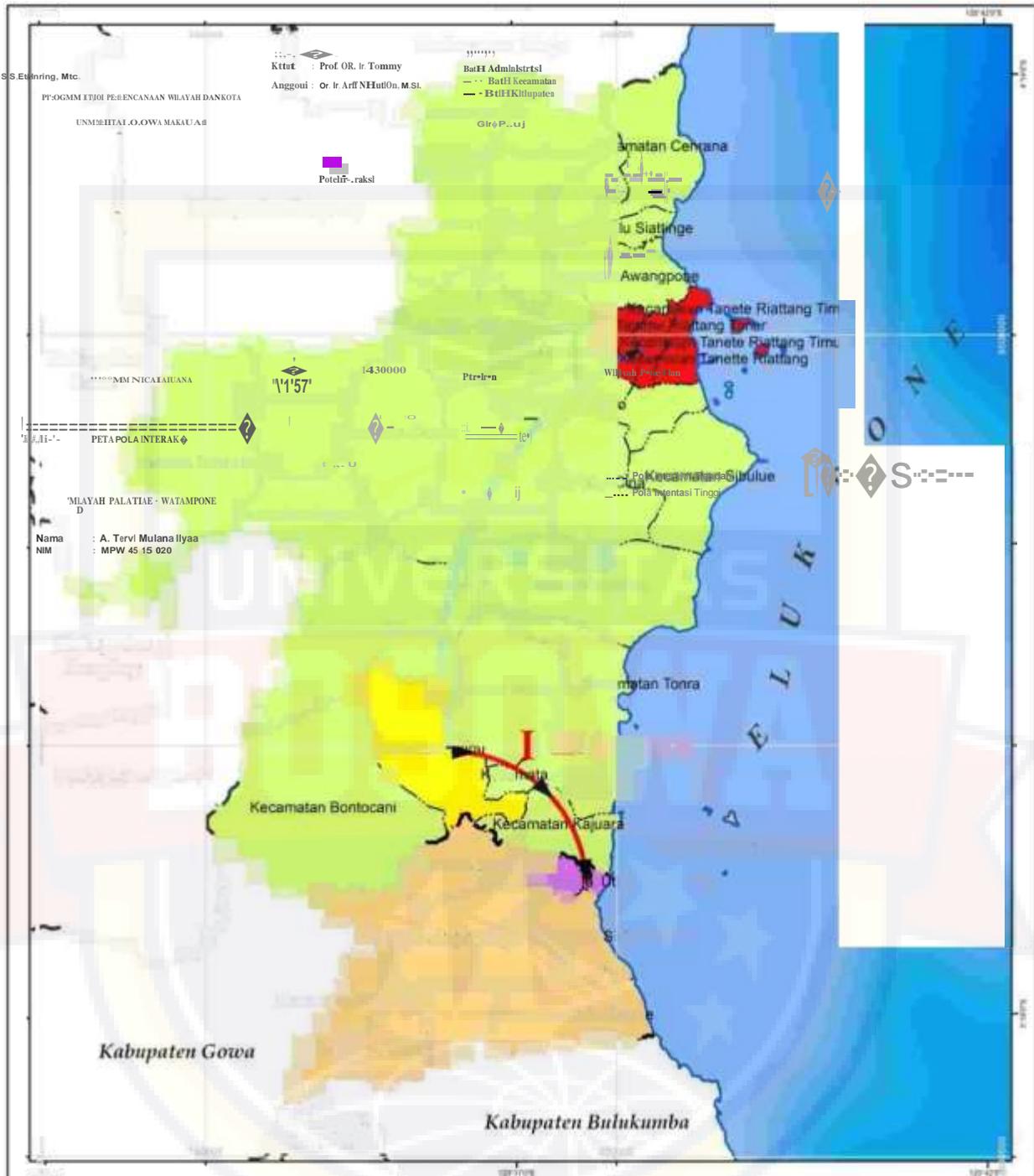
Jarak Antara;

- Palattae - Watampone : 100 Km
- Palattae - Balangnipa : 27 Km

Dari data diatas maka persamaannya yaitu;

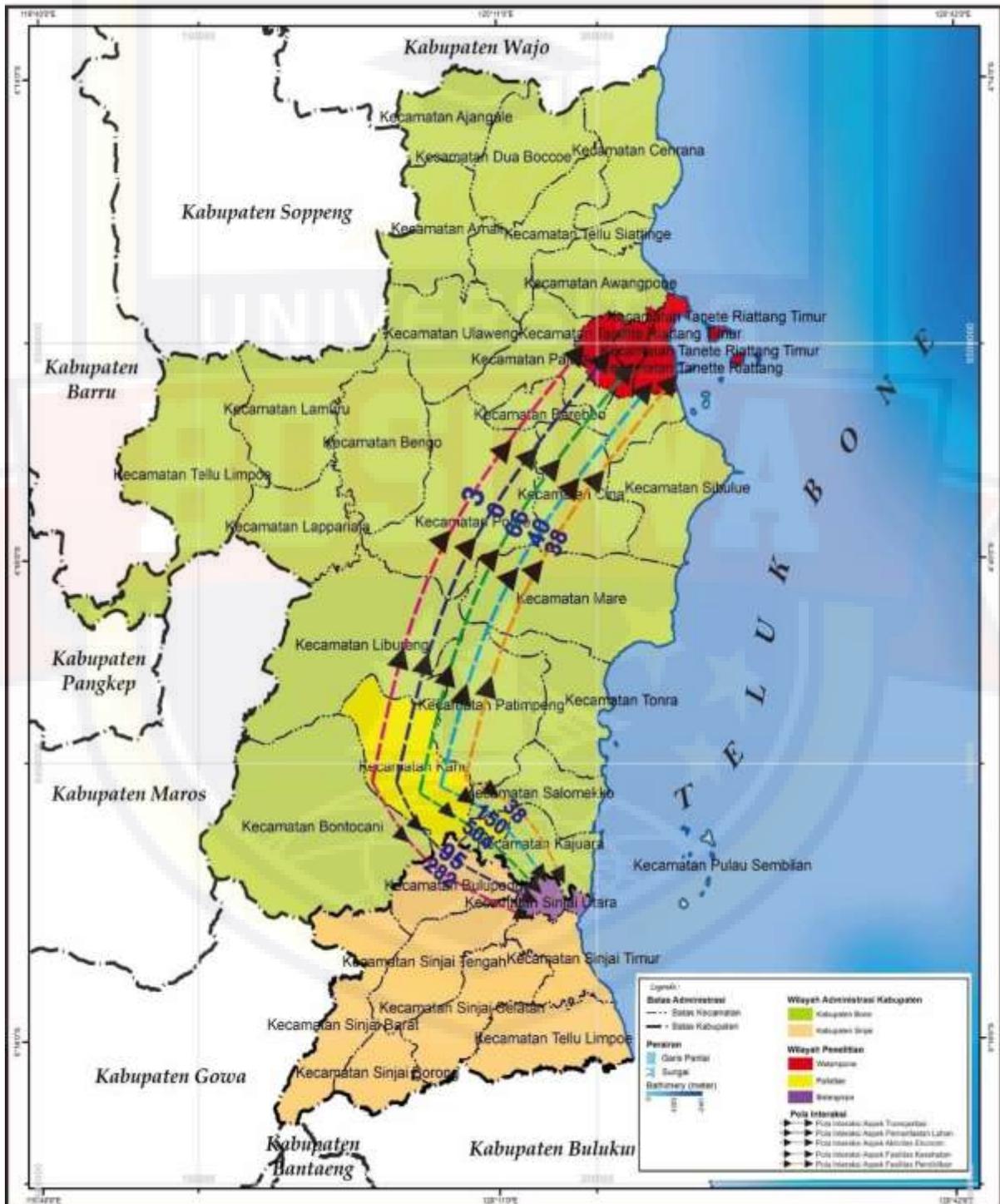
$$I_{\text{Palattae - Watampone}} = 38.574 \times 142.199 / (100)^2 = 548.518$$

$$I_{\text{Palattae - Balangnipa}} = 38.574 \times 46.166 / (27)^2 = 2.442.808$$



<p>PROGRAM PENDIDIKAN UNIVERSITAS BIGNORA MAKASSAR</p>			
<p>Author information and contact details</p>	<p> Ajilman Kartingil Jurusan : Sistem Infor Fakultas : Teknik Infor Alamat : Jl. ... </p>	<p> Tanggal : 2023 Waktu : 10:00 - 12:00 Lokasi : ... </p>	<p> ... </p>

Secara terinci berdasarkan data kuesioner, pola interaksi dapat digambarkan sebagai berikut :



Besaran nilai interaksi antara ketiga wilayah di atas hanya gambaran umum tentang bagaimana pola interaksi antara Watampone – Palattae dan Balangnipa –Palattae, belum dapat dijadikan acuan untuk menggambarkan kondisi sebenarnya mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada sehingga data yang dimiliki hanya terbatas pada data tentang jumlah penduduk Palattae yang memanfaatkan fungsi pelayanan Watampone dan Balangnipasebagai indicator untuk mengetahui bagaimana fungsi pelayanan yang ada di Watampone dan Balangnipa berpengaruh terhadap Palattae, sedangkan data yang menggambarkan sebaliknya (Jumlah penduduk Watampone dan Balangnipa yang berinteraksi ke Palattae) belum tersedia, oleh karena itu peneliti menyadari perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut terkait hal tersebut untuk kepentingan keakuratan informasi tentang pola interaksi Watampone – Palattae dan Balangnipa – Palattae.

H. Sintesis Penelitian

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan pendekatan model gravitasi yang di perkenalkan oleh W.J. Reilly (1929).Pola interaksi dapat di jelaskan bahwa tingkat interaksi yang terjadi antara Palattae-Balangnipa yaitu 2.442.808 dan interaksi Palattae – Watampone yaitu 548.518.

Akumasi dari hasil analisis dengan menggunakan skala Gutman dan hasil analisis menggunakan analisis gravitasi dapat di simpulkan bahwa, **pertama**. Dari aspek keterkaitan fisik, dukungan aspek prasarana jalan dan ketersediaan moda transportasi merupakan salah satu factor dalam mendukung Kota Palattae

dari sisi konektivitas wilayah dalam mendapatkan fungsi pelayanan Baik di Kota Watampone maupun Kota Balangnipa, namun jarak tempuh menjadi factor yang mempengaruhi intensitas interaksi keruangan antara Kota Palattae yang berkedudukan sebagai PKLp dalam struktur ruang Kabupaten Bone dan Kota Watampone yang berkedudukan sebagai PKW dalam struktur ruang Kabupaten Bone sehingga keberadaan Kota Balangnipa meskipun berkedudukan sebagai PKL dalam struktur ruang Kabupaten sinjai namun factor kedekatan jarak tempuh karena berbatasan dengan Kota Palattae cenderung dimanfaatkan sebagai pusat pelayanan pada aspek ekonomi maupun social. Realitas ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh teori W.J. Reilly (dalam Adisasmita, R. 2008), bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memerhatikan faktor jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah. Selain itu keberadaan Kota Balangnipa merupakan bentuk intervensi ruang interkasi antara Kota Palattae dan Kota Watampone sebagaimana yang dikemukakan oleh Edwar Ullman bahwa kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang (Spatial Transferability), yaitu fungsi jarak yang diukur dalam biaya dan waktu yang nyata. **Kedua**, dari aspek keterkaitan ekonomi, kecenderungan Kota Palattae dalam memanfaatkan fungsi pelayanan ekonomi dari Kota Watampone dan Balangnipa dapat dilihat pada aliran distribusi hasil pertanian dan peternakan dari Kota Palattae kewilayah pasar yang berada di Watampone dan Balangnipa serta aliran distribusi hasil perikanan dari Kota Balangnipa yang masuk kewilayah pasar di Kota Palattae dipandang sebagai indikasi proses interaksi keruangan

pada aspek ekonomi. Sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Edward Ullman, region yang saling melengkapi (region Complementary), dimana adanya region yang berbeda sumber dayanya, di satu pihak surplus dan di lain pihak minus. Kondisi ini memberikan kemungkinan membangkitkan interaksi keruangan antara kedua wilayah. **Ketiga**, dari aspek keterkaitan fasilitas social fungsi pelayanan Kota Watampone sebagai PKW terhadap Kota Palattae yang berkedudukan sebagai PKLp dirasakan tidak efektif. Hal ini karena dipengaruhi oleh factor jarak tempuh sehingga dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan maupun Pendidikan Kota Palattae tidak sepenuhnya memanfaatkan keberadaan Kota Watampone sebagai PKW, namun Kota Palattae juga memanfaatkan keberadaan wilayah sekitarnya termasuk Kota Balangnipa selaku PKL dalam memenuhi kebutuhan pada aspek sosial.

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan maka kesimpulan yang diperoleh yaitu;

1. Kemampuan Watampone dalam memberikan fungsi pelayanan sebagai PKW terhadap Palattae selaku PKLp tidak efektif (kecil pengaruhnya) dikarenakan factor jarak dan adanya intervensi Balangnipa sebagai PKL.
2. Pola interaksi yang paling dominan adalah interaksi yang terjadi antara Palattae-Balangnipa yaitu 2.442.808 bila dibandingkan dengan interaksi Palattae – Watampone yaitu 548.518.

J. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka rekomendasi yang peneliti ajukan ada 2 point yaitu :

1. Peningkatan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung aktifitas masyarakat pada aspek social dan ekonomi pada Kawasan perkotaan Palattae sehingga arahan sebagai sub pusat pengembangan wilayah, dengan fungsi sebagai pelayanan sosial, ekonomi perdagangan dan jasa, bagi kawasan bagian selatan Kabupaten Bone dapat berperan optimal sebagai wilayah pusat kegiatan local promosi (PKLp) bahkan bagi pembentukan Daerah Otonomi Baru. (DOB).

2. Agar dilakukan penelitian lebih rinci terkait aktifitas masyarakat yang ada di Kota Watampone dan Kota Balangnipa dalam memanfaatkan fungsi pelayanan di Palattae.



DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo, 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, Graha Ilmu, Jakarta.

A.Hamid Ansar. 2015. *Pola Interaksi Keruangan dan Pembentukan Aktifitas Perkotaan (Studi kasus Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan Dan Kota Sofifi)*. Tesis Dipublikasi. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa. Makassar

Arifin, Zainal, 2008. “**Penetapan Kawasan Andalan Dan “Leading Sector” Sebagai Pusat Pertumbuhan Pada Empat Koridor Di Provinsi Jawa Timur**”, Naskah Publikasi Pengembangan IPTEKS, Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Malang.

Arsyad, Lincoln, 1992, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2017, *Statistik Daerah Kabupaten Bone*, Bone.

-----, 2016,. *Statistik Daerah Kecamatan Kahu. Bone*

-----, 2016,. *Statistik Daerah Kecamatan Tanete Riatang .Bone*

-----, 2016,. *Statistik Daerah Kecamatan Tanete Riatang Barat .Bone*

-----, 2016,. *Statistik Daerah Kecamatan Tanete Riatang Timur. Bone*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, 2016,. *Statistik Daerah Kecamatan Sinjai Utara. Sinjai*

Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bone. *RDTR Kecamatan Tanete Riattang Timur Dan Tanete Riattang Barat. 2015*

Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bone. *RDTR Kecamatan Tanete Riattang. 2014*

Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan Kabupaten Bone. RTRW Kabupaten Bone 2011-2031.

Daldjoeni, N., 1997, *Seluk Beluk Masyarakat Kota*, Cetakan Kelima, Penerbit Alumni, Bandung.

Ermawati, 2010. *“Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah”*. Skripsi, Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret Surakarta : Surakarta

Eisenring, Tommy S.S, 2014. *Teori Perencanaan Wilayah Dan Kota*. Bahan Kuliah Pasca Sarjana Universitas “45” Makassar

Hafied, Hamzah. 2009. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Kretakupa Print : Makassar.

Iskani 2013. Pengukuran Skala Guttman Secara Tradisional (Cross Sectional). Online (<https://www.slideshare.net/indirakaniaputri/pengukuran-skala-guttman-tradisional>). Diakses 14 Maret 2018.

Nahrawi, Yusuf M., 2005. *“Identifikasi Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan”*, Tesis S2, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang. (tidak dipublikasikan).

Nehru, Irfin. 2009. *Proposal Riset : Analisis Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Gorontalo*.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone, tahun 2011-2031. Pemerintah Kabupaten Bone Dinas tata Ruang dan Permukiman.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai, tahun 2011-2031. Pemerintah Kabupaten Sinjai Dinas tata Ruang dan Permukiman.

Riduawan, 2013. *“Metode dan Teknik Menyusun Tesis”*, Alfabeta, Bandung.

Sutikno dan Maryunani, 2007. *“Analisis Potensi Dan Daya Saing Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kabupaten Malang”*, Journal of Indonesian Applied Economics, Volume 1 Nomor 1 hal 1-17.

Suranto dkk, 2004. *Analisis Kepuasan Konsumen Dengan Skala Guttman (Kasus Pengguna Motor Sanex Jenis bebek di Kecamatan Juwiring)*.Online (<http://journals.ums.ac.id/index.php/jiti/article/viewFile/3368/2125>). Diakses 14 Maret 2018.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

Sumaatmadja Nursid. 1988. *Studi Geografi, Suatu pendekatan dan analisa Keruangan*". Alumni Bandung. Bandung.

Surya B. 2013. *Teori-Teori Interaksi Keruangan Dalam Pengembangan Wilayah Dan Kota*. Bahan Kuliah Pasca Sarjana Universitas "45" Makassar

